ANNUAL REPORT

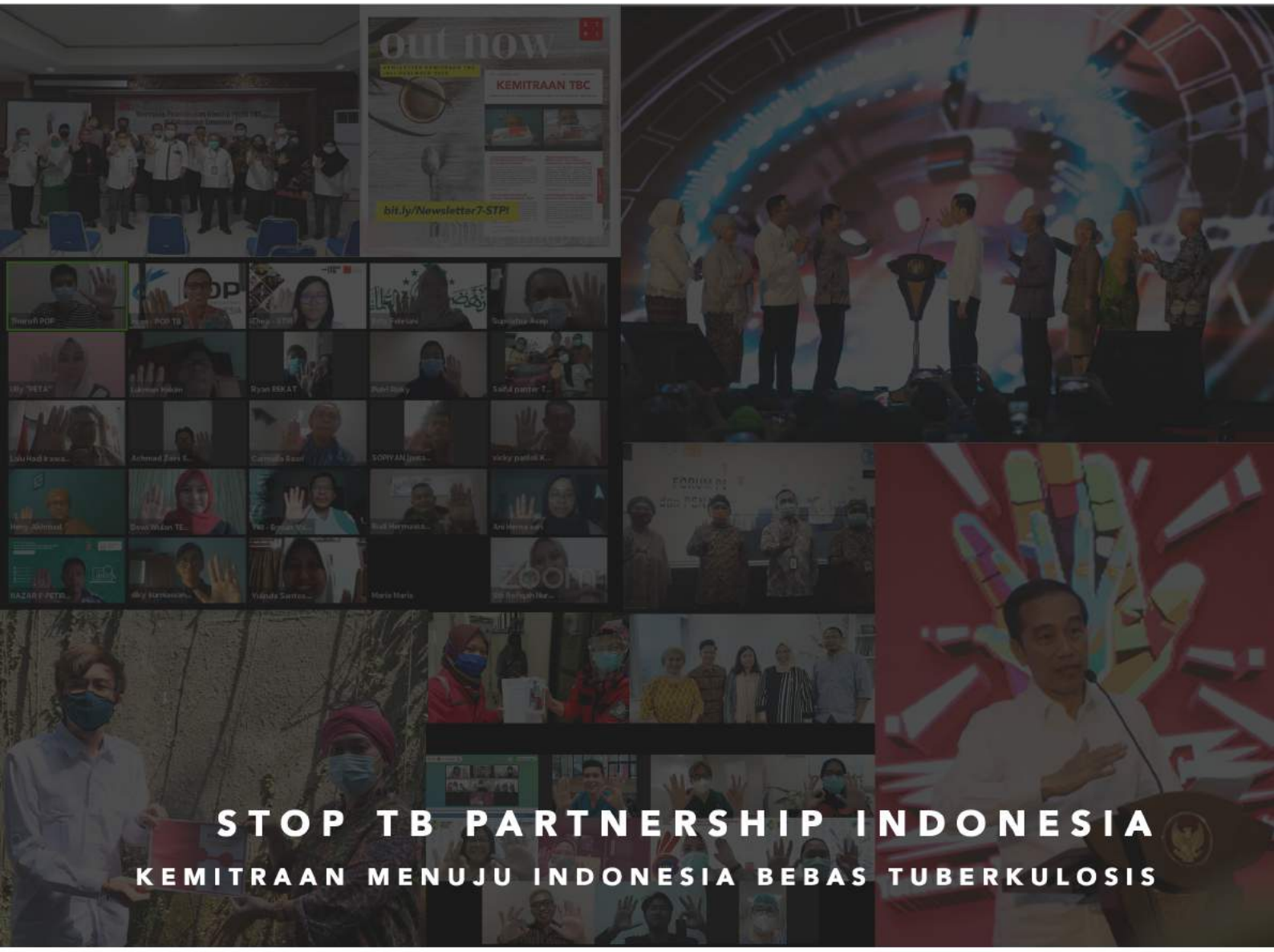

STOP TB PARTNERSHIP INDONESIA

KEMITRAAN MENUJU INDONESIA BEBAS TUBERKULOSIS

2020

Stop TB Partnership Indonesia

GERAKAN BERSAMA
MENUJU ELIMINASI
TBC 2030
musa munir Gam...
Yayasan Kemitraan S...
zulhenny - LKPP
STPI-Lukman Hakim
Yulinda .S. POP TB
Dinkes DKI Jakart...
Annisa Dinas Kes...
Maria Daeng Tb
Sukri - STPI
Hesti PANTER TB ...
Dinkes Kab Sikka
Thorofi POP
Avelinus Serbian...
Ully "PETA"
Prafitri Kumalasar...
#SekarangSaatnya
Indonesia
#ENDTB dengan
#TOSSTBC

ANNUAL REPORT 2020

STOP TB PARTNERSHIP INDONESIA

KEMITRAAN MENUJU INDONESIA BEBAS TUBERKULOSIS

S T
P I
Stop TB
Partnership
Indonesia

DAFTAR AKRONIM

ACE TB	Affected Community Empowerment to End TB
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APD	Alat Pelindung Diri
CFCS	Challenge Facility for Civil Society
CSO	Civil Society Organization
ER	Engagement Rate
HAM	Hak Asasi Manusia
HTTS	Hari Tanpa Tembakau Sedunia
IAC	Indonesia AIDS Coalition
JIP	Jaringan Indonesia Positif
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PAST	'Partnership Actions to Stop TB'
POP TB	Perhimpunan Organisasi Pasien Tuberkulosis
PPCP	Public Private Community Partnership
RAD	Rencana Aksi Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SOP	Standar Operasional Prosedur
TALKS	Tanya Apaaja Lewat Kita Spesial

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 01
Tentang STPI 02
Anggota Dewan dan Tim Eksekutif 03
Pendahuluan 04
Isu Strategis 05
Pendekatan 06
Potret Capaian STPI 2020 07
Target dan Capaian 2020 09
Capaian Media dan Komunikasi 12
Tantangan 13
Kegiatan STPI 14
Kegiatan Kampanye dan Edukasi TBC 15
Program PAST (Partnership Action to Stop TB) 30
Program Hibah ACE-TB CFCS 44
Pengembangan Jejaring dan Advokasi 52
Manajemen Organisasi dan Program 64

KATA PENGANTAR

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan TBC menjadi semangat kunci dari STPI. Sinergi dan kolaborasi antar para pemangku kepentingan akan memperbesar peluang tercapainya target eliminasi TBC di Indonesia tahun 2030.

Tahun 2020 menjadi tahun tantangan bagi perjalanan kerja-kerja kolektif STPI dalam upaya penanggulangan TBC. Pandemi COVID-19 telah merubah pola kerja organisasi dengan mengurangi interaksi melalui *physical* dan *social distancing* sehingga aktifitas bekerja lebih banyak dalam bentuk *Work from Home* (WFH). Sekalipun kerja secara virtual dan WFH, tim STPI mampu memaksimalkan hasil kerja dengan capaian yang cukup signifikan di tahun ini.

Kerja-kerja kampanye dan edukasi TBC tetap dilakukan dengan beragam inovasi dan kreatifitas dalam bentuk *podcast* dan webinar, termasuk memperkuat pemberitaan TBC ditengah pandemi COVID-19 berkolaborasi dengan AJI (Aliansi Jurnalis Independen).

Advokasi dan pengembangan jejaring mitra juga tetap menjadi perhatian dari STPI di tahun 2020 ini. Fasilitasi pertemuan virtual TBC Nasional dan keterlibatan dalam perancangan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan TBC menjadi salah satu bukti *concern* dari organisasi.

Pada program STPI di daerah, telah memberikan hasil yang baik dengan terbentuknya kelembagaan Forum pencegahan dan pengendalian TBC di Kab. Sumenep dan Kab. Lombok Barat. Kelembagaan Forum di dua Kabupaten ini telah mendapatkan pengakuan dan legalisasi dari Bupati masing-masing.

Capaian besar STPI di tahun ini adalah mendapatkan Hibah GF ATM 2021-2023 dan ACE TB CFCS 2020-2021.

Namun demikian, Eksekutif STPI tidak melupakan membangun mekanisme kerja internal. Beragam SOP disusun untuk memperkuat kerja organisasi, antara lain; SOP Administrasi dan Keuangan, SOP Manajemen Program dan SOP Komunikasi.

Laporan ini memaparkan berbagai kegiatan dan kerja yang telah dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas STPI kepada masyarakat Indonesia. Diharapkan agar pembaca dapat mengetahui langkah-langkah baru yang diambil oleh STPI baik untuk internal organisasi maupun memperkuat kemitraan dalam mengakhiri TBC.

HENY AKHMAD

DIREKTUR EKSEKUTIF

klik disini untuk informasi lebih lanjut

TENTANG STPI

Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) didirikan pada tanggal 30 Mei 2013 dan diketuai oleh Arifin Panigoro. Salah satu bentuk kegiatan utama saat itu adalah forum komunikasi antara mitra-mitra STPI yang menjadi suatu wadah bagi berbagai organisasi maupun perorangan yang secara bersama-sama sepakat untuk membantu mengatasi masalah TBC. Forum tersebut menjadi wadah bagi para mitra yang peduli dan berupaya membantu penanggulangan TBC di Indonesia untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi. Pada tahun 2018, organisasi ini bertransformasi menjadi Stop TB Partnership Indonesia (STPI).

STPI merupakan organisasi nirlaba yang menjadi wadah kemitraan lintas sektor bagi organisasi dan individu yang berkomitmen mendukung Program Tuberkulosis Nasional menuju Indonesia Bebas TBC. Memahami tantangan yang harus dihadapi ke depan, maka STPI berupaya untuk mengembangkan diri secara organisasi baik internal maupun eksternal. Sejak tahun 2019, STPI telah resmi menjadi mitra Kementerian Kesehatan dan diharapkan mampu meningkatkan kemitraan strategis dalam penanggulangan TBC untuk mengatasi permasalahan yang timbul serta menjembatani peluang sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai eliminasi tuberkulosis.

klik yang digarisbawahi
untuk info lebih lanjut

ANGGOTA DEWAN DAN TIM EKSEKUTIF

DEWAN PEMBINA

Ir. Arifin Panigoro
Pendiri Medco Energi Internasional

Diah Satyani Saminarsih
Penasihat Gender dan Kepemudaan
World Health Organizations

DEWAN PENASIHAT

dr. Achmad Sujudi, SpB, MHA
Menteri Kesehatan RI (2000-2002) dan Ketua Badan Pengawas, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia

dr. Carmelia Basri, M.Epid
Ahli Penanggulangan Penyakit Menular Langsung dan Sistem Kesehatan dan Kepala Subdirektorat Tuberkulosis, Kementerian Kesehatan (2005-2008)

Dr. Esty Febriani, M.Kes
Penasihat Senior Project TB LKNU dan Co Founder Global Health Initiative Indonesia

William Slater
Direktur Kesehatan, USAID Indonesia

Amb. (ret) drs. Rizali W. Indrakesuma
Diplomat
(Duta Besar RI di India 2012-2017)

dr. Donald Pardede, MPPM
Ahli Pembiayaan Kesehatan dan Staf Khusus Kemenkes RI Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan (2018-2019)

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K)
Spesialis Urologi dan Staf Khusus Kemenkes RI Bidang Peningkatan Pelayanan (2017-2019)

Dr. dr. Erlina Burhan, SpP(K)
Spesialis Paru

Anindita Sitepu, MSc
Dewan Penasihat Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives

TIM EKSEKUTIF

DIREKTUR EKSEKUTIF:
HENY AKHMAD

KEMITRAAN & TATA KELOLA
Manajer: **dr. Henry Diatmo, MKM.**
Asisten Program: **Refajri Galifiyanda**

ADVOKASI & KOMUNIKASI
Manajer: **Thea Hutanamon**
Staf Advokasi: **Indro Laksono**
Staf Komunikasi: **Diniati P. Yunitasari**

PENGEMBANGAN PROGRAM & MANAJEMEN PENGETAHUAN
Manajer: **Lukman Hakim**
Senior Program dan MEL Officer: **Nuriyani**

KEUANGAN & ADMINISTRASI
Manajer: **Yenny F. Yoris**
Staf Administrasi: **Prafitri Kumalasari**
Staf Kantor: **Rubi Arya Putra**

PENDAHULUAN

Disaat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, nyatanya negara kita masih darurat tuberkulosis atau yang biasa kita sebut dengan TBC. Menurut Global TB Report 2019 yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada bulan Oktober lalu, Indonesia menduduki peringkat kedua dengan jumlah kasus tertinggi TBC di dunia setelah India.

Upaya yang lebih sistematis dan kolaboratif untuk pencegahan dan pengendalian TBC harus terus dilakukan untuk menekan laju perkembangan TBC menuju eliminasi TBC tahun 2030.

Penyelesaian permasalahan TBC yang pantang surut membutuhkan gagasan-gagasan baru. Besaran urusan TBC tidak hanya mencakup persoalan pasien tetapi juga menjaga populasi yang sehat. Eliminasi TBC 2030 diharapkan dapat tercapai melalui enam prinsip strategi program TBC nasional 2020-2024, yaitu melalui: (1) penguatan kepemimpinan pemerintah, (2) peningkatan akses layanan bermutu dan berpihak pada pasien, (3) optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, (4) pemanfaatan hasil riset dan teknologi, (5) peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor, serta (6) penguatan manajemen program melalui sistem kesehatan.

Enam strategi diatas perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing pihak baik dari pemerintah, swasta, akademisi, jurnalis dan komunitas.

STPI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, 29 Januari 2020 meluncurkan 'Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030'. Gerakan kolosal kolaboratif yang menjadi tonggak kesadaran eliminasi TBC di Indonesia.

klik disini untuk informasi lebih lanjut

ISU STRATEGIS

Kemitraan Lintas Sektor & Multi-Pihak Untuk Mengakhiri Tuberkulosis

Kemandirian organisasi masyarakat

Komitmen politis pemerintah

Peran dan kontribusi sektor swasta

STPI berkontribusi dalam eliminasi TBC melalui penguatan kemitraan pemerintah, swasta, dan komunitas di wilayah sasaran dengan dukungan kebijakan pusat dan daerah.

VISI

Indonesia bebas tuberkulosis melalui kemitraan yang kuat

MISI

1. Mendukung pemerintah dalam mencapai target terhadap indikator nasional yang telah ditetapkan dengan inovasi-inovasi yang efektif sesuai dengan potensi dan kapasitas STPI
2. Mendorong harmonisasi program TBC secara lintas sektor, yang berlandaskan tata kelola yang akuntabel, transparan, dengan dampak terukur
3. Mendorong pelayanan TBC yang sesuai standar sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap TBC dan dalam mencari layanan kesehatan secara proaktif
4. Memobilisasi dukungan, sumber daya, dan upaya dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional melalui sebuah skema kemitraan untuk upaya pengendalian TBC di Indonesia
5. Mempengaruhi kebijakan terkait TBC melalui advokasi kepada pemangku kepentingan

PENDEKATAN

Setelah fokus pada pengembangan Forum menjadi Yayasan di tahun 2018, pada tahun keenam organisasi STPI mulai beroperasi dengan pengurus organisasi baru dan meningkatkan kontribusi dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia melalui pendekatan strategis sebagai berikut:

'Partnership Actions to Stop TB' (PAST):
Memberdayakan dan memperkuat kemitraan multisektor melalui advokasi kebijakan dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai Indonesia Bebas TBC (eradikasi) pada tahun 2050.

SWASTA: Mendorong pelibatan dunia usaha dan mekanisme pembiayaan alternatif untuk meningkatkan dukungan bagi beragam inisiatif lokal dalam mengakhiri TBC

PEMERINTAH: Meningkatkan komitmen dan aksi politis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mengimplementasikan dan mencapai target 'End TB 2030' sebagai sarana untuk mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta

KOMUNITAS: Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil lintas sektor dan komunitas terdampak TBC mengambil andil dalam pengendalian penyakit dan advokasi untuk pelayanan TBC yang berkualitas serta berpusat pada pasien.

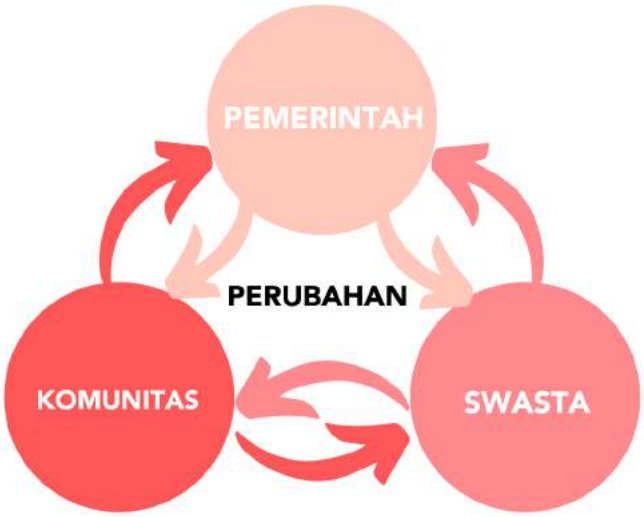

PAST adalah model
"Public-Private-Community-Partnership"

Stop TB Partnership Indonesia bekerja dengan landasan bahwa perubahan dalam merespon epidemi TBC membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang harmonis dan berkelanjutan dari 3 pihak: pemerintah, swasta dan masyarakat. Artinya, pemangku kepentingan sektor swasta, baik penyedia layanan kesehatan maupun perusahaan, serta masyarakat perlu dilibatkan secara bermakna dalam persiapan, perencanaan, dan pemantauan program TBC di tingkat nasional maupun daerah.

POTRET CAPAIAN STPI 2020

PARTISIPAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Partisipan dalam kegiatan yang telah dilakukan oleh STPI di tahun 2020 mencapai 9.688 orang. Dengan perbandingan partisipan laki-laki sebanyak 60% atau 5.813 orang sedangkan perempuan berjumlah 3.875 orang atau 40%.

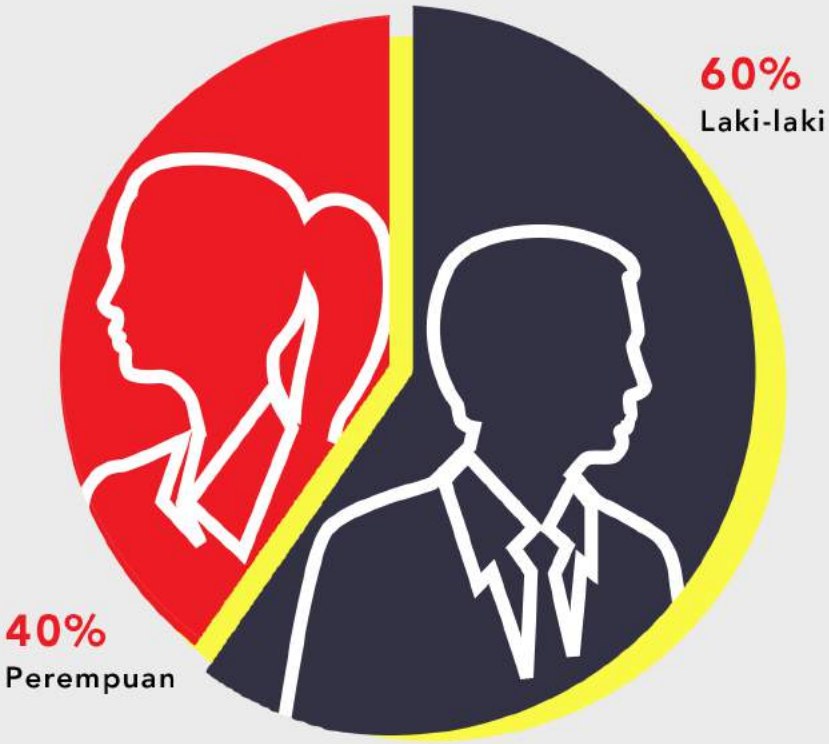

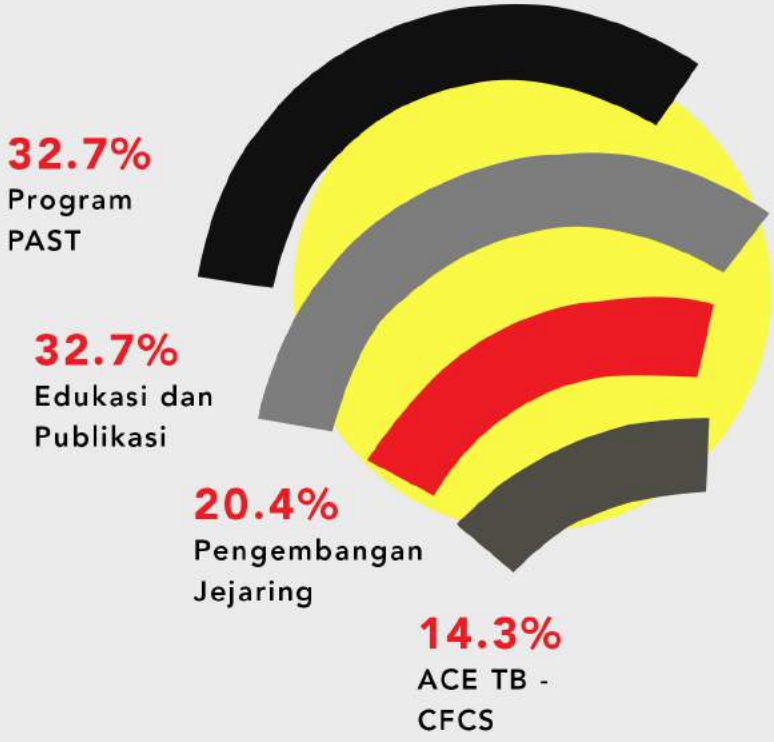

PROPORSI JUMLAH KEGIATAN

Grafik disamping menyajikan informasi proporsi jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan. Program PAST memiliki kegiatan 36% (14) kegiatan, Edukasi dan publikasi 28% (11). kegiatan advokasi dan pengembangan jejaring 18% (7) kegiatan dan ACE CFCS masing-masing 18% (7) kegiatan.

CAPAIAN PENDANAAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh STPI sepanjang tahun 2020, 48% bersumber dari pendanaan internal, 17% berasal dari pendanaan eksternal dan 35% pendanaan berasal dari kolaborasi antara STPI dan berbagai mitra, seperti Kemenkes, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PDTT, DPR RI, USAID, Stop TB Partnership, Johnson and Johnson, Bank Mandiri, WHO, Medco Energy, Medco Foundation, Tahir Foundation, PT. Garam (Persero), CISDI, dan Baznas.

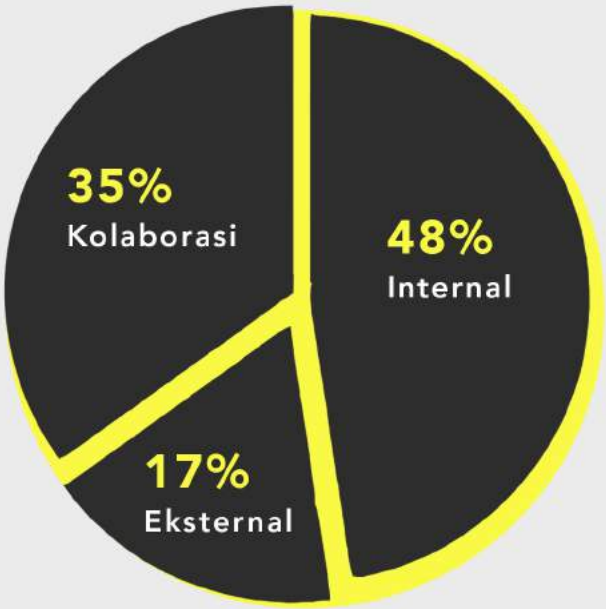

KETERLIBATAN LINTAS SEKTOR

Di tahun 2020, partisipan yang terlibat dalam kegiatan bervariasi organisasi atau lembaga. Dalam grafik digambarkan keterlibatan pemerintah mencapai 52% atau 5.040 orang, masyarakat 37,9% atau 3.6704 orang, CSO 7,1% atau 687 orang. Sementara dari sektor swasta sebesar 0,7% atau 65 orang dan akademisi 1,1% atau 110 orang. Selain itu keterlibatan media dalam kegiatan yang telah dilakukan mulai terlihat, sebanyak 1,2% atau 116 orang dari berbaga media telah berpartisipasi dalam kegiatan.

52% Pemerintah

37.9% Masyarakat

7.1% CSO

1.2% Media

1.1% Akademisi

0.7% Badan Usaha Swasta

TARGET DAN CAPAIAN 2020

PADA 2020, YAYASAN STPI MEMILIKI TARGET CAPAIAN SEBAGAI BERIKUT;

Pada level daerah (Kab Sumenep dan Lombok Barat) mempunyai target meningkatkan kemampuan pemerintah daerah kabupaten dalam mengindentifikasi, merencanakan, serta mengambil tindakan untuk mengurangi kerentanan terhadap TBC. Target ini diindikasikan melalui (a) setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki *focal point* dengan pengetahuan penanggulangan TBC; (b) 50% kabupaten sasaran memiliki profil TBC dan rencana aksi daerah (RAD); (c) 50% kabupaten sasaran mengintegrasikan isu TBC dalam perencanaan penganggaran daerah (RPJMD); (d) memiliki pembiayaan pencegahan dan pengendalian TBC secara mandiri melalui APBD; (e) 50% kabupaten sasaran memiliki regulasi dan; (f) pembentukan kelembagaan forum kemitraan TBC Kabupaten Sasaran.

Di akhir 2020, hasil capaian program dilevel daerah belum sesuai dengan yang direncanakan. Ada beberapa target yang belum tercapai antara lain: penyusunan profil TBC dan Rencana Aksi Daerah (RAD), pembiayaan pencegahan dan pengendalian TBC secara mandiri melalui APBD dan penyusunan regulasi TBC. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu hambatan dalam upaya untuk memenuhi target di daerah, upaya untuk mengurangi interaksi sosial dan memenuhi protokol kesehatan menjadikan beberapa pertemuan gagal untuk diselenggarakan. Selain itu, ada modifikasi kegiatan untuk beradaptasi dengan pandemi Covid-19 dengan mengembangkan beragam webinar yang memadukan isu TBC dengan Covid-19.

CAPAIAN	KAB. LOMBOK BARAT	KAB. SUMENEP
Focal point dengan pengetahuan penanggulangan TBC	(tercapai)	(tercapai)
Profil TBC Daerah	(tercapai) (finalisasi)	(belum tercapai)
Rencana aksi daerah (RAD)	(belum tercapai)	(tercapai)
Mengintegrasikan isu TBC dalam perencanaan penganggaran daerah (RPJMD)	(belum tercapai)	(belum tercapai)
Pembiayaan pencegahan dan pengendalian TBC secara mandiri melalui APBD	(belum tercapai)	(belum tercapai)
Regulasi TBC Daerah	(belum tercapai)	(belum tercapai)
Forum Kemitraan TBC Daerah	(tercapai)	(tercapai)

(tercapai) (belum tercapai)

INDIKATOR	TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI
Kebijakan Nasional (Peraturan Presiden)	(finalisasi)
Kaukus TBC Parlemen	

(tercapai) (belum tercapai)

Di level Nasional, Yayasan STPI memiliki target meningkatkan peran multi pihak dan lintas sektor dalam perencanaan, perumusan dan legalisasi kebijakan nasional dalam pencegahan dan pengendalian TBC. Target ini diindikasikan melalui (1) diterbitkannya Kebijakan Nasional mengenai Penanggulangan TBC yang melibatkan peran multipihak dalam proses perencanaan dan perumusannya dan (2) pembentukan Kaukus TBC di Parlemen.

Target nasional yang direncanakan belum sepenuhnya tercapai. Kebijakan Nasional TBC masih dalam proses finalisasi dan pembentukan Kaukus TBC di Parlemen masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan Komisi IX. Pada 2020 menjadi fase untuk mengembangkan kesadaran parlemen, khususnya Komisi IX DPR RI untuk memahami kondisi dan hambatan dalam pencegahan dan pengendalian TBC di Indonesia dengan memperbanyak pelibatan anggota Komisi IX dalam beragam kegiatan Nasional dan regional yang membahas isu TBC.

Capaian besar lainnya pada program nasional adalah bersama mitra Forum STPI melakukan monitoring protokol pelayanan TBC di masa pandemi Covid-19. Hasil dari monitoring ini memberikan masukan pada Kementerian Kesehatan RI tentang kepatuhan terhadap protokol layanan TBC di masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Hasil riset survei monitoring implementasi protokol layanan TBC pada masa pandemi Covid-19 digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan penguatan layanan TBC di tengah pandemi Covid -19.

Selain target diatas, Yayasan STPI juga mentargetkan untuk adanya dukungan multi pihak dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian TBC melalui mobilisasi sumberdaya yang berkelanjutan.

Pada target ini, diindikasikan dengan keberfungsian Forum Kemitraan TBC Nasional lintas sektor dan Forum kemitraan TBC di level daerah yang terlegalisasi oleh Pemerintah Daerah.

Sebagian target dapat dipenuhi, terutama pembentukan Forum Kemitraan TBC Daerah yang dilegalisasi oleh Bupati Kepala Daerah Kab Sumenep dan Kab Lombok Barat. Namun untuk target keberfungsian Forum TB Nasional untuk mengadvokasi kebijakan nasional belum berfungsi secara optimal. Forum Kemitraan Nasional TBC masih memerlukan penataan kelembagaan dan perencanaan program sehingga mampu mengambil peran secara signifikan dalam pengembangan kebijakan Nasional TBC.

Mitra CSO STPI mampu mengidentifikasi, merencanakan, mengambil tindakan untuk mengurangi kerentanan terhadap TBC. Target ini diindikasikan dengan meningkatnya kapasitas mitra jejaring dalam pengelolaan kelembagaan sehingga mampu merencanakan program dan kegiatan secara mandiri.

Target ini dikhususkan pada mitra Perhimpunan Organisasi Pasien (POP) TB Indonesia untuk mampu mengembangkan organisasinya secara lebih kuat. Capaian yang terlihat antara lain: (1) pada akhir 2020, rencana strategis POP TB sedang dalam proses finalisasi (2) pengembangan situs web POP TB dan organisasi jejaring POP TB di daerah telah selesai dibuat untuk digunakan sebagai media informasi dan komunikasi TBC.

Selain capaian-capaian diatas, secara internal STPI dalam kurun waktu 2020 telah mampu mengembangkan mekanisme kerja organisasi yang meliputi SOP Program, SOP Alur Komunikasi, SOP Monitoring Evaluasi, SOP Administrasi dan SOP Keuangan.

Selama 2020, STPI juga telah mampu mengembangkan program melalui beragam pendanaan dari eksternal. Pendanaan eksternal ini memiliki peran yang signifikan untuk memperkuat kerja-kerja dan jaringan STPI dalam mendorong percepatan eliminasi TBC 2030.

STPI bersama Yayasan Penabulu membentuk Konsorsium untuk mengajukan diri sebagai penerima dana hibah Global Fund (GF) komponen TBC dari kelompok komunitas. Setelah melalui proses seleksi dan penilaian oleh GF, Konsorsium Penabulu-STPI) dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai Principal Recipient (PR) berdasarkan surat CCM (Country Coordinating Mechanism) Indonesia No: 285/CCM/SEC/IX/2020.

Secara keseluruhan pendanaan PR TB komunitas untuk periode 2021-2023 dari GF berjumlah USD 26,461,010 sesuai rancangan dalam *Funding Request* proposal Indonesia yang berlandaskan Strategi Nasional TBC 2020-2024. Kegiatan Konsorsium Penabulu-STPI akan mencakup intervensi pelayanan TBC dan TBC resistan obat berbasis komunitas (investigasi kontak; pendampingan minum obat; pelacakan pasien TBC RO mangkir), penguatan sistem komunitas, serta upaya mengatasi hambatan hukum, HAM dan gender dalam mengakses layanan TBC yang berkualitas.

STPI berkolaborasi dengan POP TB Indonesia mendapatkan dukungan dana dari Stop TB Partnership Global melalui *Challenge Facility for Civil Society grant mechanism*. Adapun besaran pendanaan berjumlah 100.000 USD.

Hibah program berisikan serangkaian kegiatan pemberdayaan komunitas terdampak TBC terkait advokasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Program ini diharapkan meningkatkan kapasitas komunitas terdampak TBC termasuk pemangku kepentingan TBC, membantu mengidentifikasi dan memantau hambatan terutama untuk mengakses layanan, memperkuat advokasi komunitas ditingkat nasional dan daerah, serta dapat meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi komunitas, masyarakat serta pihak lain dalam merespon program TBC di Indonesia.

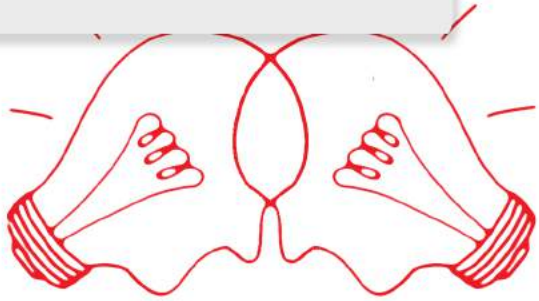

CAPAIAN MEDIA DAN KOMUNIKASI

STPI memiliki 3 orang Duta TBC (dr. Reisa Broto Asmoro, dr. Sonia Wibisono dan dr. Tirta Mandira Hudhi) untuk memperkuat kampanye dan edukasi TBC di masyarakat.

Secara berkala mengembangkan *editor meeting* dengan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) untuk memperkuat pemberitaan TBC di Indonesia. Berikut proporsi pemberitaan terkait TBC dan STPI di tahun 2020.

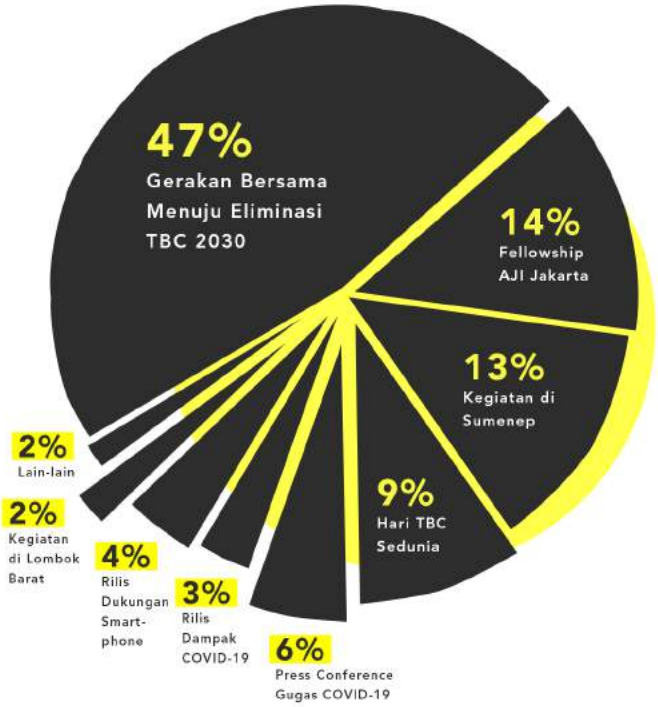

Penambahan pengikut hingga 3 kali lipat, jumlah impresi hingga lebih dari 1 juta dan jangkauan hampir 1 juta selama 2020 cukup signifikan dalam media sosial yang dikelola oleh STPI. Data analisis media sebagai berikut.

	POST	FOLLOWERS	JANGKAUAN	ER
	505	1596 (85%)	261,508	4.26%
	441	416 (10.36%)	641,902	8.68%
	598	89 (38.85%)	145,092	9.82%
	8	77 (3850%)	2,559	121%
	39	47 (213%)	19,518	8.99%
	5	3 (100%)	113	4%

TANTANGAN

PANDEMI COVID-19

dengan kewajiban untuk kepatuhan pada protokol kesehatan sangat berpengaruh pada implementasi kegiatan. Pembatasan interaksi sosial menjadikan banyak kegiatan di level Kabupaten belum bisa dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial.

PROSES MENDAPATKAN DANA HIBAH GLOBAL FUND (GF) 2021-2023

telah mengambil porsi waktu yang tidak sedikit pada personil di Yayasan STPI. Sumber daya manusia yang terbatas sebagian harus fokus pada persiapan untuk mendapatkan hibah Global Fund (GF). Begitupula setelah dikeluarkannya keputusan sebagai pemenang hibah, personil Yayasan STPI harus benyak meluangkan waktu untuk melakukan persiapan implementasi program Global Fund 2021-2023.

SELAMA PANDEMI COVID-19

seluruh Pemerintah Daerah fokus pada penanganan wabah Covid-19. Energi Pemerintah Daerah diarahkan untuk penyelesaian Covid-19. Hal ini sangat berpengaruh terhadap komitmen Pemerintah Daerah untuk program TBC.

SELAMA 2020

Yayasan STPI melakukan perubahan kegiatan, teutama kegiatan di daerah. Program lebih diarahkan pada kegiatan seminar atau workshop virtual yang mendiskusikan isu TBC dengan sandingan Covid-19.

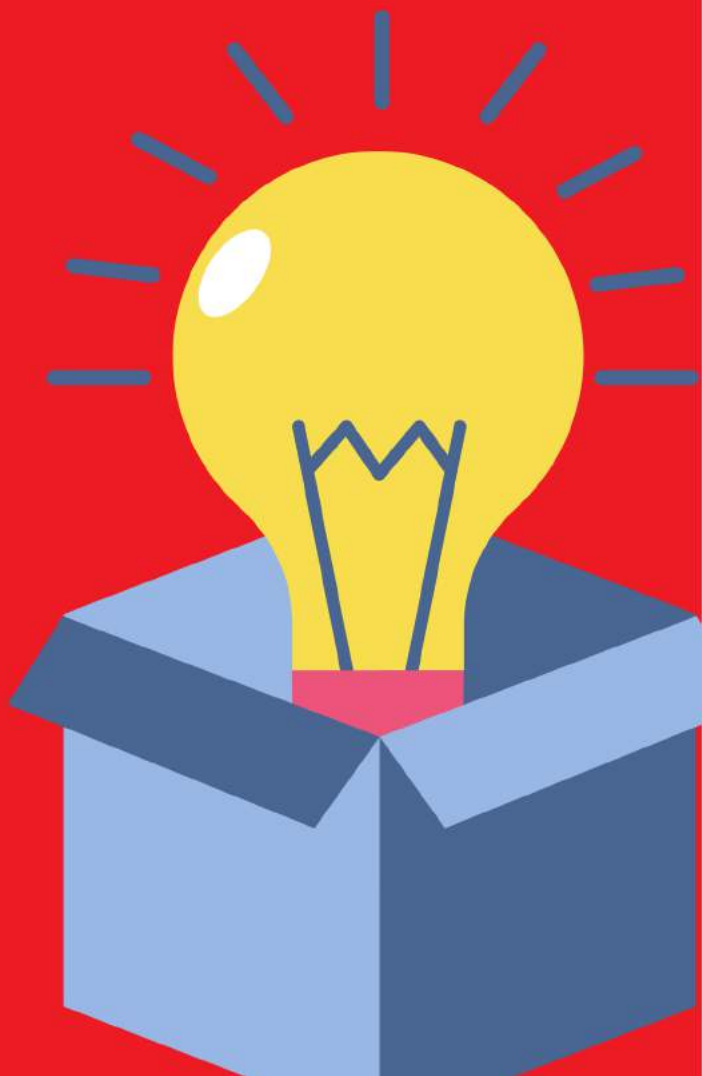

KEGIATAN STPI

KEGIATAN KAMPANYE DAN EDUKASI TBC

klik yang digarisbawahi
untuk info lebih lanjut

KEGIATAN KAMPANYE DAN EDUKASI TBC

GERAKAN BERSAMA MENUJU ELIMINASI TBC 2030

STPI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, 29 Januari 2020 meluncurkan 'Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030'. Kegiatan diselenggarakan di Techno Park Cimahi, Jawa Barat. Pertemuan ini dihadiri lebih dari 800 perwakilan kementerian/lembaga, pimpinan daerah, sektor swasta, serta anggota masyarakat. Momentum ini bertujuan untuk mendorong respon terhadap TBC di nasional dan daerah yang berlandaskan pendekatan lintas sektor.

Dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo menegaskan dalam arahannya, "Mencapai target eliminasi TBC 2030 perlu kerja keras dari semua pihak, bukan hanya sektor kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk membangun jalan tetapi hunian yang sehat", pesan Presiden kepada kepala daerah yang diharapkan memimpin upaya tersebut.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Arifin Panigoro, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang aktif dalam pemberantasan TBC, menguraikan, "Memang mengatasi TBC perlu dukungan lebih banyak sektor. Terutama dari segi infrastruktur sebab kuman TBC semakin lama melayang-layang di tempat yang lembab, kurang cahaya matahari, dan tanpa ventilasi. Kepadatan lingkungan juga mempermudah penularan antar individu."

DUTA TBC dr. REISA BROTO ASMORO AJAK STOP STIGMA TUBERKULOSIS

Bertepatan dengan Hari Kasih Sayang pada tanggal 14 Februari 2020, dr. Reisa Broto Asmoro melalui videonya mengajak kita untuk berhenti menstigma orang lain dan berbagi kasih, terutama pasien Tuberkulosis. Karena, selain merugikan secara ekonomi, TBC juga mengakibatkan dampak buruk secara sosial akibat stigma dan diskriminasi seperti dikucilkan di masyarakat. Stigma juga dapat menghambat orang dengan gejala TBC untuk mengunjungi layanan kesehatan dan pasien dalam menyelesaikan pengobatan.

Dalam konteks upaya mengakhiri TBC, Hari Kasih Sayang dapat menjadi momentum untuk berhenti menyebarkan kebencian atau dalam hal ini dapat diartikan sebagai stigma yang pada akhirnya berujung kebencian tidak membuat orang-orang dengan TBC merasa tidak nyaman dan tanpa dukungan. Selain itu, dr. Reisa juga mengajak untuk menyemangati orang dengan TBC dan HIV tepat di Hari AIDS Sedunia, 1 Desember 2020.

Ia juga mengajak melakukan perilaku pencegahan, bersolidaritas dan kolaborasi program TBC dengan HIV juga sebaliknya terutama dalam masa pandemi untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, mengatasi stigma dan meningkatkan peran ODHA serta penyintas TBC dalam pengambilan keputusan serta arus kebijakan terkait TBC dan HIV di Indonesia.

TALK 1: FORUM ZAKAT GAGAS ALIANSI FILANTROPI TUBERKULOSIS

Melalui program Tanya Apa Aja Lewat Kita "TALK" Episode 1 (STPI Ngorek Dompet dr. Yeni! - Aliansi Filantropi TBC) yang dilaksanakan pada April 2020 bersama dengan dr. Yeni Purnamasari dari Dompet Dhuafa (DD). Beliau menyampaikan bahwa DD menginisiasi pembentukan Aliansi Filantropi TBC dengan lembaga-lembaga filantropi dan lembaga zakat yang ada di Indonesia sejak bulan Desember 2019. Hingga kini, sejumlah 16 lembaga telah tergabung dalam aliansi karena memiliki visi dan semangat yang sama sebagai pengelola dana umat untuk berkolaborasi mengatasi tantangan dalam mengakhiri TBC.

Harapannya dengan terbentuknya aliansi ini, pasien TBC semakin banyak ditemukan, diobati dan memutus rantai penularan. Sehingga semakin banyak yang disembuhkan. Kasus TBC RO juga diharapkan berkurang sesuai target eliminasi TBC tahun 2030 dan pasien TBC ini bisa berdaya kembali kehidupannya bersama keluarga serta memiliki mata pencaharian setelah mereka menyelesaikan pengobatan. Jadi tidak hanya selesai sampai pengobatan (tetapi sampai hidup berdaya kembali).

WEBINAR: PEMERINTAH, DPR RI, MITRA PEMBANGUNAN, DAN KOMUNITAS "BAGAIMANA INDONESIA MENGHADAPI COVID-19"

STPI, Global TB Caucus dan USAID Indonesia dengan partisipasi lintas sektor berdiskusi dalam kegiatan webinar yang mengulas berbagai aspek dalam upaya menghadapi COVID-19 dan TBC bersama pemerintah, mitra pembangunan, dan komunitas, Jumat, 8 Mei 2020. Webinar pertama di Indonesia tentang COVID-19 dan TBC ini dihadiri oleh 9 tenaga ahli DPR RI dan lebih dari 200 peserta pegiat kesehatan masyarakat di Indonesia.

Dalam kegiatan ini, dr. Moh. Bey Sonata, Project Management Specialist USAID Indonesia menyampaikan bahwa strategi untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 perlu ditinjau kembali karena kondisi COVID-19 yang berdampak pada layanan dan penemuan kasus TBC. Bahkan diestimasikan bahwa layanan TBC akan kembali ke 5-6 tahun sebelumnya

dimana penemuan kasus masih sangat rendah dan angka penularan di masyarakat sangat tinggi.

WEBINAR: "STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TUBERKULOSIS DI MASA PANDEMI COVID-19"

Hadirnya pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia tahun 2030. Sejak terkonfirmasinya kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret, laju penularan COVID-19 melesat hingga pada 19 Mei 2020, jumlah total orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 18.496 kasus. Cepatnya penularan COVID-19 membuat respon terhadap COVID-19 menjadi fokus utama kegiatan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga penanggulangan penyakit menular lainnya, seperti TBC, seolah tidak lagi menjadi prioritas dalam masa pandemi COVID-19.

Sebagai upaya memastikan penanggulangan TBC tetap berjalan, pada tanggal 19 Mei 2020, STPI bersama Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri memberikan pemahaman kepada para pemangku kebijakan di daerah tentang urgensi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tuberkulosis dalam masa pandemi. Upaya ini dilakukan melalui seminar daring yang bertajuk "Urgensi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tuberkulosis di Masa Pandemi COVID-19". Seminar tersebut dibuka oleh dr. M. Subuh, MPPM (Ketua Umum PP ADINKES), dipandu oleh dr. Eduard Sigalingging, M.Si. (Direktur SUPD III, Kemendagri) sebagai moderator, dan dihadiri oleh Pungkas Bahjuri Ali, MS, Ph.D (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS), Ahmad Saehu, S.Kep (Perawat Poli TB DOTS, Puskesmas Kecamatan Ciracas), Puan Meirinda Sebayang (Chair, Sekretariat Jaringan Indonesia Positif/Affected Communities Delegation to the Stop TB Partnership Board), serta Heny Akhmad (Direktur Eksekutif STPI) sebagai pembahas.

Seminar daring ini diselenggarakan secara terbuka dan dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang dari berbagai latar belakang, mulai dari Kementerian/Lembaga, organisasi masyarakat, dan organisasi-organisasi pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan serta BAPPEDA.

PODCAST: CEGAH ANAK DAN REMAJA INDONESIA DARI BUJUKAN ROKOK

Setiap tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia, untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat akan bahaya rokok bagi kesehatan yang bahkan juga dapat berdampak pada keadaan ekonomi manusia. Sejalan dengan pendapat Lara Rizka, selaku Koordinator Program Pengendalian Tembakau Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) saat sesi bincang TALKS yang tayang di kanal Podcast STPI, bahwa tiga hal yang paling penting untuk mengatasi dan mengendalikan tembakau dan rokok adalah dengan menaikkan cukai rokok, melakukan pembatasan penjualan rokok dan menghapus iklan, promosi dan sponsorship rokok di medium manapun. Apabila ketiga hal tersebut dengan sungguh-sungguh diterapkan di Indonesia akan sangat berdampak pada perokok.

Lara berharap, momentum ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk refleksi diri, untuk bersyukur terutama bagi yang masih memiliki paru-paru sehat salah satunya dengan cara tidak merusak diri sendiri salah satunya karena merokok. Ia juga mengajak anak muda untuk ikut berperan, bersuara di medium apapun, menyuarakan agar rokok tidak dibuat seaksesibel itu dan menolak untuk dijadikan target industri rokok. Anak muda juga bisa memulai dengan hal simpel seperti mengajak orang terdekatnya untuk melakukan hal lain yang lebih berguna dibandingkan menghabiskan waktu dan uang untuk merokok.

TO BE CONNECTED: PERJUANGAN PASIEN TBC-XDR HINGGA MENCAPAI KESEMBUHAN

Pada 26 Juni 2020, STPI mengadakan sesi LIVE Instagram Episode 1 bersama dengan Farahdiba Dzalika Fatah, seorang penyintas TBC-XDR yang sudah sekitar 3 tahun berobat

sampai pada akhirnya sembuh. Farahdiba merupakan seorang mahasiswi kedokteran tingkat akhir yang hampir mengalami keseluruhan fase penyakit TBC mulai dari TBC Sensitif Obat, TBC Multidrug Resistan hingga sekarang TBC-XDR. Meskipun begitu, Farahdiba yang biasa dipanggil Aya tidak merasakan gejala yang biasanya kita dengar sebagai gejala yang paling utama dari TBC yaitu batuk lebih dari dua minggu. Aya hanya merasakan demam berkepanjangan yang tanpa alasan dilanjut dengan berat badan yang tidak naik padahal selalu makan banyak. Lalu merasakan sering lemas namun seringkali dihiraukan karena sedang banyaknya kegiatan. Kemudian Aya merasakan keringat yang tidak hanya di malam hari saja tapi sepanjang hari sehingga pada akhirnya ia drop secara drastis hingga dirawat inap karena sedang beban pikiran juga dan kelelahan.

Farahdiba mengatakan, hanya dengan minum OAT (Obat Anti Tuberkulosis) teratur sampai tuntas, berdoa dan support keluarga yang bisa membunuh bakteri Tuberkulosis di dalam dirinya sampai ia sembuh. Ia merasakan bahwa menjadi mahasiswa kedokteran yang sakit TBC itu berat karena ia sudah mengetahui bagaimana ia bisa menularkan ke orang lain. Pada akhirnya hanya keyakinan dari diri sendiri-lah yang dapat menguatkan semangatnya untuk terus minum obat.

WEBINAR: PERAN DESA DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pemerintah Indonesia saat ini sudah berkomitmen untuk melakukan upaya penanggulangan TBC dengan menjadikannya sebagai prioritas nasional dengan target Indonesia dapat terbebas dari TBC pada tahun 2030. Presiden Joko Widodo pada 29 Januari 2020 menyatakan bahwa diperlukan dukungan lintas sektor guna mencapai target tersebut. Namun hingga saat ini, desa jarang mendapatkan perhatian dalam diskursus penanggulangan TBC di Indonesia. Berdasarkan data PDDI Kemendesa, Indonesia memiliki 74.954 Desa. Banyaknya jumlah tersebut membuat desa dapat menjadi modal utama dalam percepatan upaya eliminasi TBC. Oleh karena itu, pada 2 Juli 2020,

STPI bersama ADINKES, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa PDTT berupaya untuk memantik diskusi terkait keterlibatan desa dalam penanggulangan TBC melalui seminar daring yang bertajuk "Peran Desa Dalam Penanggulangan Tuberkulosis". Seminar daring ini diselenggarakan secara terbuka dan dihadiri oleh 1.000 orang dari berbagai latar belakang (Kementerian/Lembaga, organisasi masyarakat, dan organisasi-organisasi pemerintah daerah) serta disaksikan oleh kurang lebih 700 orang melalui siaran langsung di Youtube.

Seminar daring dibuka oleh Ketua Umum PP ADINKES yang menyatakan bahwa pembangunan kesadaran masyarakat desa untuk mengenali TBC sangat penting karena masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya penanggulangan TBC di Indonesia. Pernyataan tersebut diamini oleh Direktur KGM BAPPENAS yang menyampaikan bahwa pengendalian TBC di tingkat Desa dan melibatkan masyarakat desa dapat memperluas cakupan imunisasi, penemuan kasus dan peningkatan keberhasilan pengobatan TBC, peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan data TBC di tingkat desa, serta dukungan sosial ekonomi. Direktur KGM Bappenas juga berkata bahwa peran masyarakat dalam penanggulangan TBC di desa perlu difasilitasi oleh pemerintah desa.

Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendesa PDTT menyebutkan bahwa salah satu wujud kolaborasi antara pemerintah desa dan organisasi supra desa terdapat pada penyusunan RPJM Desa yang merupakan titik strategis untuk mensinergikan Renstra dan arah kebijakan desa. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendesa PDTT, dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC kepada pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.

Diskusi dalam seminar daring "Peran Desa Dalam Penanggulangan Tuberkulosis" yang diselenggarakan tanggal 2 Juli 2020 ini menghasilkan kesepemahaman bahwa pelibatan desa dalam upaya penanggulangan TBC membutuhkan dukungan multisektor di tingkat daerah dan regulasi atau panduan di tingkat nasional yang secara spesifik ditujukan bagi pemerintah desa. Regulasi yang dimaksud membutuhkan kerja kolaborasi tiga kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PDTT.

PELUNCURAN DAN PEMBACAAN 'HORE! TIBI SEMBUH' MENYAMBUT HARI ANAK NASIONAL 2020

Pada 18 Juli 2020 telah berlangsung peluncuran dan pembacaan buku cerita dengan judul 'Hore! Tibi Sembuh' yang merupakan hasil kerja sama dari Subdirektorat Tuberkulosis (Subdit TB) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, USAID TB Private Sector (USAID TB PS), Ikatan Dokter Anak Indonesia(IDAI) dan mitra-mitra lainnya.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kampanye mitra-mitra peduli tuberkulosis termasuk STPI untuk menyambut Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2020. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dihadiri oleh 215 orang peserta yang terdiri dari anak-anak, ibu rumah tangga, tenaga kesehatan, pendidik, para pemerhati TBC, dan penggemar dongeng, serta anggota organisasi penyintas TBC.

"Melalui buku ini diharapkan masyarakat yang membacanya dapat mengetahui gejala TBC pada Anak dan memahami tindakan apa yang perlu dilakukan apabila menemukan gejala tersebut pada anak dan menyadari betapa pentingnya Terapi Pencegahan TBC bagi anak. Harapannya buku ini dapat bermanfaat agar Anak Indonesia Sehat dan Bebas TBC." dr. Imran Pambudi, MPHM.

EDITOR'S MEETING: "KONDISI PEMBERITAAN PENANGANAN TBC DI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19"

Bekerjasama dengan AJI Jakarta, STPI menyelenggarakan editor meeting dengan tema "Kondisi Pemberitaan Penanganan TBC di Indonesia di Masa Pandemi COVID-19 pada 2 Oktober 2020. Dalam editor meeting ini menghadirkan narasumber: Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Achmad Yurianto, Direktur Eksekutif STPI dan perwakilan dari POP TB Indonesia.

Dalam paparannya Achmad Yurianto, menekankan pentingnya penanganan

TBC ini semestinya bukan hanya sebagai masalah sektoral namun nasional. "Di Indonesia bukan hanya masalah Kemenkes, tapi masalah negara," ujarnya.

Selain diskusi, AJI Jakarta juga mendapat masukan dari 15 editor media massa terkait dengan peliputan tentang TBC. Dari masukan para editor tersebut, memang perlu bagi media dalam memperkuat liputan TBC untuk mencegah penularan yang lebih masif.

Adapun lingkup pemberitaan yang perlu ditingkatkan terkait dengan TBC adalah kejelian redaksi media untuk menyajikan data serta menuliskan fenomena yang relevan terkait TBC. Penekanan terkait dampak serius TBC juga perlu diekplorasi oleh jurnalis.

Dalam menggali isu TBC, jurnalis pun mesti lebih kritis untuk memantau implementasi aturan serta program pemerintah, di samping terus mendorong agar narasumber tidak hanya normatif dalam menjawab persoalan TBC yang penting ini.

"Untuk mendukung upaya-upaya pemberitaan TBC yang baik dan benar, AJI Jakarta bersama STPI berkeinginan untuk mengadakan fellowship peliputan seputar TBC. Selain itu, TOR untuk panduan pemberitaan TBC pun akan kami galakkan," kata Afwan Purwanto, Sekretaris AJI Jakarta.

Kegiatan editor meeting ini diikuti peserta berjumlah 31 orang berasal dari media yang tergabung dalam AJI Jakarta, Kemenkes, STPI dan penyintas TBC.

DISKUSI PUBLIK PENINGKATAN PELIPUTAN TBC YANG MASIH TERPINGGIRKAN

STPI bekerja sama dengan AJI Jakarta pada 23 Oktober 2020 menyelenggarakan diskusi jurnalis tentang strategi peningkatan peliputan TBC ditengah pandemic COVID 19. Kegiatan ini dihadiri 43 peserta yang terdiri atas perwakilan AJI Jakarta, Stop TB Partnership Indonesia, 27 peserta jurnalis undangan dari media nasional dan daerah dan peserta umum serta disiarkan secara langsung di media sosial AJI Jakarta.

Dalam paparannya, Jurnalis Kompas yang berpengalaman meliput TBC, Adhitya Ramadhan tak menyangkal mengenai rendahnya peliputan berita tentang TBC. Dia mengungkapkan, dari puluhan kasus peliputan kesehatan, hanya hitungan jari yang

spesifik mengarah pada peliputan TBC.

Terbatasnya isu TBC yang dimunculkan ke publik, menurut Adhit, tak lepas dari minimnya informasi dan kesadaran atas dampak TBC. Hal itu lantas berdampak pada pengembangan angle peliputan di kalangan jurnalis yang selama ini juga terbatas. Padahal menurutnya, persoalan TBC bisa dikulik tidak hanya sebatas isu kesehatan yang terbatas. Namun, juga bisa dikaitkan pada isu menarik yang lebih luas misalnya ekonomi dan pembangunan daerah.

dr. TIRTA MANDIRA HUDHI BERGABUNG SEBAGAI DUTA STOP TBC INDONESIA

Duta TBC merupakan salah satu strategi yang menempatkan figur publik menjadi role model yang memiliki kepedulian pada kesehatan masyarakat, khususnya penanggulangan TBC. Peran penting dari duta TBC adalah melakukan kampanye pengembangan kesadaran untuk melakukan gerakan menerapkan norma-norma hidup sehat (cegah, periksa, obati TBC sampai sembuh) dengan pendekatan popular. Selain itu, duta TBC menjadi tokoh yang menyampaikan pikiran dan memiliki sikap untuk tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan TBC. harapnnya masyarakat akan lebih mudah menyerap informasi TBC dengan edukasi dari influencer kepada target sasaran masing-masing sehingga berbagai lapisan masyarakat turut mendukung upaya eliminasi TBC 2030.

Pada 8 September 2020 dilakukan penandatanganan MoU antara Ibu Heny Akhmad selaku Direktur Eksekutif STPI dengan dr. Tirta Mandira Hudhi sebagai duta TBC STPI. Tidak lama setelahnya, dr. Tirta turut mengisi program STPI To Be Connected spesial Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2020 bersama dengan Manik

Marganamahendra. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 1.000 audiens melalui Instagram STPI dan dr. Tirta.

Ia menyampaikan bahwa pemuda dapat memaknai momentum Sumpah Pemuda dengan caranya masing-masing asalkan bertanggungjawab dengan apapun cara yang mereka pilih. Beliau menyampaikan untuk selalu jaga kesehatan karena bakteri TBC memperparah kondisi tubuh apalagi bagi yang memiliki penyakit penyerta. Kita semua bertanggungjawab atas kesehatan diri sendiri dan orang lain di sekitar.

PODCAST: MENGUPAS TUNTAS TUBERKULOSIS, HIV DAN STIGMANYA - APA YANG BISA KITA LAKUKAN?

Disaat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, nyatanya negara kita masih darurat tuberkulosis atau yang biasa kita sebut dengan TBC. Menurut Global TB Report 2019 yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada bulan Oktober lalu, Indonesia menduduki peringkat kedua dengan jumlah kasus tertinggi TBC di dunia setelah India. Orang-orang dengan sistem imun imunokompromais, seperti orang dengan HIV/AIDS (ODHA) memiliki beban 19 kali lebih besar untuk sakit TBC dibandingkan orang tanpa HIV ketika terinfeksi bakteri TBC. Penyakit ini merupakan infeksi penyerta yang sering dihadapi ODHA (31,8%), sekitar 60% ODHA yang terinfeksi bakteri TBC akan jatuh sakit dengan gejala TBC aktif. Komorbiditas TBC dan HIV/AIDS menjadi tantangan serius dalam pengendalian kedua penyakit ini karena masing-masing penyakit dapat memperburuk kondisi penyakit lainnya (Subdirektorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan RI (2020).

Begitupun yang disampaikan oleh Ibu Meirinda Sebayang, Ketua Sekretariat Nasional JIP dalam sesi bincang eksklusif TALKS yang ditayangkan dalam bentuk podcast dari STPI pada 2 November 2020 dengan tajuk Kupas Tuntas TBC, HIV dan Stigmanya. Beliau mengatakan bahwa penyakit TBC dan HIV itu berhubungan erat, dimana TBC adalah infeksi oportunistik yang menyebabkan rentannya kematian pada ODHA dan telah dibuktikan pada riset-riset global.

"TBC adalah silent-killer, infeksi oportunistik pembunuh pertama ODHA pada umumnya karena dampak TBC pada ODHA dengan imunitas yang rendah memang luar biasa. ... dia (ODHA dengan TBC) harus terus

memperkuat sistem imunnya di sisi lain juga harus melawan bakteri TBC." terang Bu Mei.

Mengatasi kedua penyakit menular ini membutuhkan perhatian khusus terhadap kebutuhan pasien HIV dengan TBC. Meskipun TBC dijamin kesembuhannya, tetapi kedua penyakit ini membutuhkan durasi minum obat dengan jangka waktu panjang sehingga sangat mempengaruhi kehidupan keluarga pasien, terutama akibat efek samping obat, dampak psikososial penyakitnya dan keadaan ekonomi pasien selama masa perawatan.

WEBINAR: PEDULI TBC UNTUK INDONESIA LEBIH SEHAT

Salah satu Duta TBC Indonesia, dr. Sonia Wibisono bersama dengan dr. Erlina Burhan selaku Dewan Penasihat STPI memperingati Hari Kesehatan Nasional dengan berbincang-bincang sehat dalam program Konsul Sehat yang diselenggarakan oleh Klikdokter dan STPI tanggal 12 November 2020. Dalam sesinya, dr. Sonia mengajak seluruh masyarakat dari sektor manapun untuk sama-sama berjuang dalam penanggulangan TBC. Begitu juga dikatakan oleh dr. Erlina untuk tetap memprioritaskan upaya TBC meskipun sedang dilanda pandemi COVID-19. Kegiatan ini berlangsung selama satu jam secara interaktif dengan dipandu oleh dr. Vito Damay dan diakhiri oleh sesi tanya jawab bersama audiens. Saksikan siaran ulangnya di Facebook Stop TB Partnership Indonesia atau YouTube Klikdokter.

SERIAL SANDIWARA TBC - BEBAS TBC MULAI DARI KITA

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat, STPI bersama dengan mitra-mitra meluncurkan kisah Serial Sandiwara TBC Episode 2 dengan judul "Bebas TBC Mulai dari Kita". Serial ini merupakan hasil karya edukasi kesehatan Subdirektorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan RI bersama dengan STPI, Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, USAID TB Private Sector, Yayasan KNCV Indonesia dan POP TB Indonesia. Kisah yang diangkat khusus untuk Hari Kesehatan Nasional adalah kisah lanjutan dari Buku Cerita "Hore! Tibi Sembuh" dengan mengangkat kisah Dita, teman Tibi selaku pemeran utama yang

mengkhawatirkan gejala TBC pada ayahnya. Serial ini tersedia dalam format audio dan video yang dapat diakses di kanal media sosial Stop TB Partnership Indonesia dan mitra seperti Subdirektorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indonesia Muda untuk TBC (IMUT), Yayasan KNCV Indonesia, dan POP TB Indonesia. Kisah ini dikemas sedemikian rupa agar dapat cocok di telinga anak hingga orang dewasa. Ayo dengarkan dan terus bagikan gerakan #SatuTekadMenujuSehat.

PODCAST: PERAN SERTA MASYARAKAT SIPIL TERDAMPAK TBC DAN HIV DALAM RESPON SECARA BERMAKNA

Bertepatan pada Hari AIDS Sedunia, 1 Desember 2020, STPI berdiskusi secara eksklusif tentang upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sipil dalam respon terhadap HIV/AIDS, identifikasi tantangan untuk kolaborasi TBC-HIV yang bermakna bagi komunitas serta rekomendasi solusi yang diberikan dalam sesi TALKS Episode 4 – Perkuat Solidaritas dan Kolaborasi sesuai dengan tema Hari AIDS Sedunia tahun 2020. Pada kesempatan ini, STPI mengundang Direktur Eksekutif IAC yaitu Edo Aditya Wardhana.

Menurut Edo, momen Hari AIDS Sedunia ini diharapkan dapat menjadi refleksi untuk pemerintah dan komunitas

mengapa belum mencapai target 90-90-90 pada tahun ini. Persoalan HIV/AIDS ini tidak akan selesai apabila masyarakat masih menganggap bahwa urusan HIV/AIDS dan TBC ini hanya urusan pemerintah dan LSM saja. Pilihan untuk tidak menstigma dan diskriminasi ada pada masing-masing diri masyarakat untuk membiarkan ODHA sembunyi dan memilih tidak melakukan pengobatan sehingga berpotensi mentransmisikan kepada orang lain. Momen ini menjadi kesempatan kita untuk merangkul dan memberikan dukungan pada ODHA dan populasi kunci TBC dan HIV.

"Upaya Pemerintah dan komunitas untuk menyediakan pengobatan kepada ODHA dan juga TBC tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Cari dukungan apabila mengalami efek samping pengobatan dan jangan berhenti untuk berobat. Hidup dengan HIV itu tidak merubah makna hidup kita di dunia ini. Kita bisa tetap produktif dan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya." Pesan Edo khusus untuk ODHA di Hari AIDS Sedunia 2020.

PERLUAS JANGKAUAN PROMOSI TUBERKULOSIS, STPI KAMPANYEKAN TOSS TBC MELALUI RADIO RRI

Dalam rangka mengakhiri tuberkulosis melalui kemitraan yang kuat antara swasta, pemerintah, dan masyarakat, STPI memperluas jangkauan kampanye TOSS (Temukan, Obati, Sampai Sembuh) TBC dengan menayangkan iklan layanan masyarakat selama 60 detik di Pro3 RRI Jaringan Nasional 88,8 FM dengan jumlah 400 tayangan. Momentum Hari TBC Sedunia menjadi awal mula publikasi iklan layanan masyarakat ini, yaitu sejak 24 Maret hingga 31 Desember 2020.

Radio Republik Indonesia (RRI) memiliki total pendengar sejumlah 45,7 juta jiwa di desa dan kota seluruh Indonesia dengan usia pendengar diatas 15 tahun. Adanya kampanye melalui radio Pro3 RRI ini diharapkan dapat terus menyuarakan informasi TBC hingga ke pelosok nusantara dan memperkuat upaya penanggulangan TBC di seluruh Indonesia.

***

"Anak-anak adalah asset yang paling berharga dalam membawa Indonesia maju tahun 2050, TBC tidak hanya dialami orang dewasa tetapi akan menjangkiti orang-orang dengan imunitas rendah seperti anak-anak. Dalam konteks program TBC kita perlu melindungi anak dari TBC agar anak sehat dan menjadi generasi yang kuat."

dr. Imran Pambudi, MPHM
Manajer TBC Nasional dalam
Peringatan Hari Anak Nasional 2020

PROGRAM PAST

PARTNERSHIP ACTIONS TO STOP TB

PROGRAM PAST
PARTNERSHIP ACTIONS TO STOP TB

PERTEMUAN VIRTUAL "PELAYANAN TBC PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAYANAN KESEHATAN KAB. LOMBOK BARAT"

STPI bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat telah menyelenggarakan pertemuan virtual dalam pembahasan Pelayanan TBC pada Masa Pandemi COVID-19 di Layanan Kesehatan Kabupaten Lombok Barat selama dua hari, tanggal 28 dan 29 April 2020. Kegiatan pertemuan virtual ini diikuti oleh penanggung jawab program TBC dari 18 puskesmas dan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan TBC dan pelaksanaan protokol pelayanan TBC yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI pada akhir Maret 2020 lalu. Diskusi difokuskan pada penyesuaian pelayanan TBC yang dilakukan layanan pada masa pandemi, kendala dan tantangan dalam menjalankan pelayanan serta rencana dalam memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan TBC di layanan kesehatan. Hasil diskusi bisa dilihat pada infografis berikut.

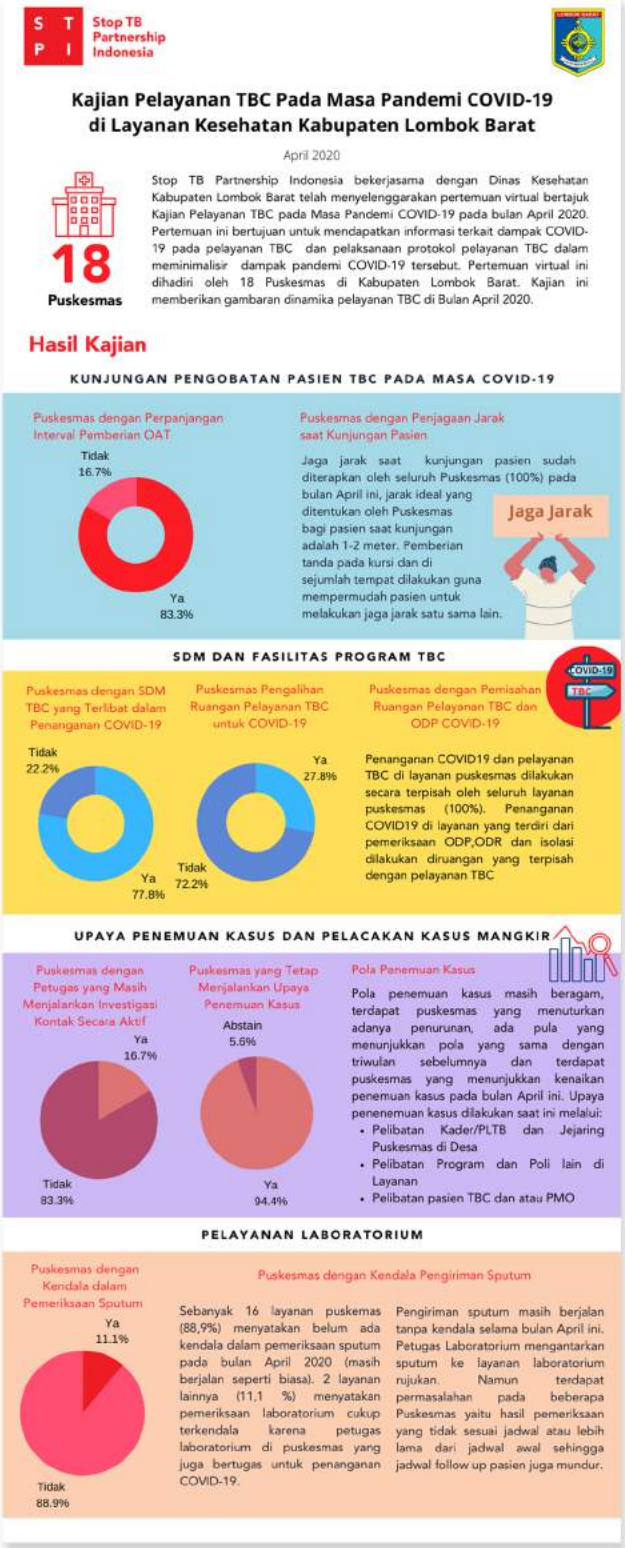

KAJIAN LAYANAN TBC DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA LAYANAN KESEHATAN KABUPATEN SUMENEP

Selain melakukan advokasi dalam mengakhiri Tuberkulosis (TBC) di tingkat nasional, Stop TB Partnership Indonesia (STPI) juga berupaya memperkuat daerah di Indonesia dalam upaya pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat daerah. Program ini diselenggarakan melalui pendekatan PPCP untuk mewujudkan masyarakat Sumenep yang mandiri TBC; memiliki penganggaran dan inisiatif tersendiri dalam pencegahan dan pengendalian penyakit TBC sehingga dapat dijadikan model bagi daerah lain untuk mempercepat eliminasi TBC.

Dalam masa pandemi COVID-19 ini, STPI melakukan kajian untuk mendapatkan informasi terkait dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan TBC dan pelaksanaan protokol pelayanan TBC yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI pada akhir Maret 2020 lalu. Hasil kajian ini berpusat pada penyesuaian pelayanan TBC yang dilakukan layanan pada masa pandemi, kendala dan tantangan dalam menjalankan pelayanan serta rencana dalam memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan TBC di layanan kesehatan. Kegiatan dilaksanakan secara virtual tanggal 30 April – 4 Mei 2020. Peserta terdiri dari 30 penanggung jawab TB dari PKM dan 5 orang dari Dinkes Kabupaten Sumenep. Hasil kajian diskusi ini terdapat dalam infografis berikut:

KAJIAN PELAYANAN TBC PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAYANAN KESEHATAN KAB. SUMENEP

30 MEI - 2 JUNI 2020

Stop TB Partnership Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19 dengan pola penyebaran yang masih menunjukkan peningkatan dan telah berdampak ke seluruh provinsi. Respon terhadap pandemi ini mengharuskan adanya penyesuaian terhadap pelayanan program kesehatan lainnya termasuk pelayanan TBC yang dijalankan di fasilitas kesehatan pelayanan primer. Untuk mendukung pelaksanaan layanan TBC pada masa COVID-19 pada layanan di Kab. Sumenep, Stop TB Partnership Indonesia (STPI) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab. Sumenep telah menyelenggarakan pertemuan virtual terkait pelayanan TBC pada masa COVID-19 di layanan kesehatan Kab. Sumenep. Melalui pertemuan ini diharapkan STPI mampu mendapatkan informasi terkait pelayanan TBC yang dilakukan saat ini guna memetakan peran dalam mendukung Dinas Kesehatan dan layanan kesehatan dalam menjalankan pelayanan TBC pada masa pandemi COVID-19 ini.

Peserta

30 Puskesmas

41 Orang

Manajemen dan Perencanaan

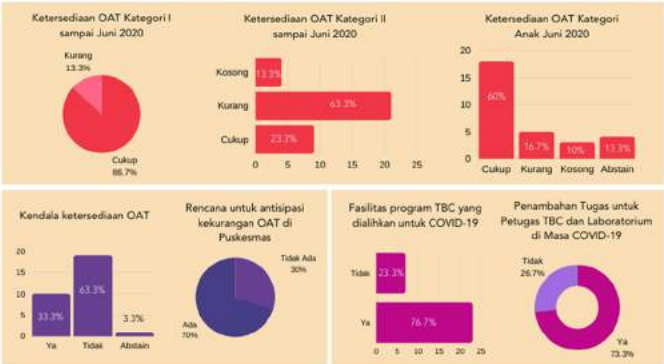

Pencegahan

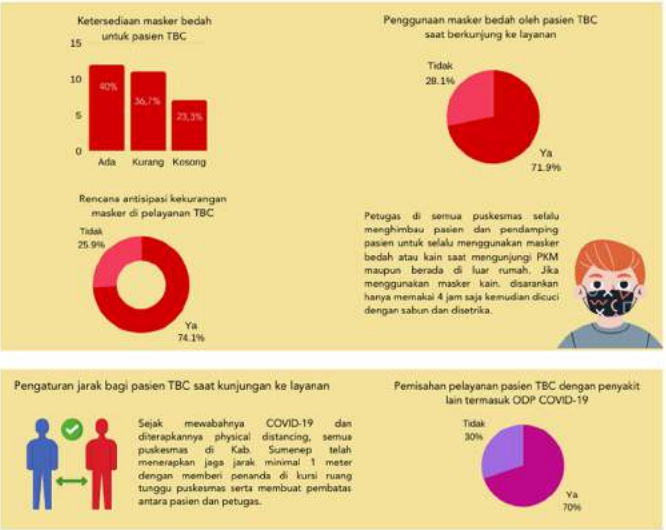

Perawatan dan Pengobatan

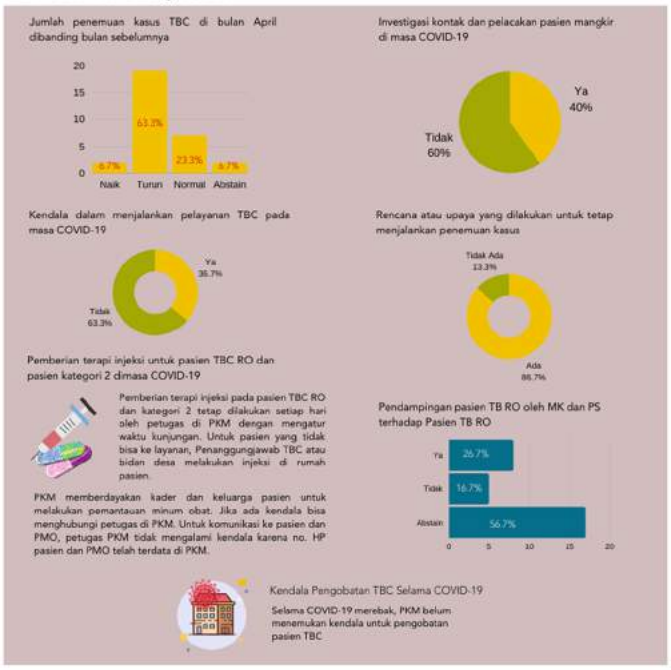

Layanan Laboratorium

Edukasi

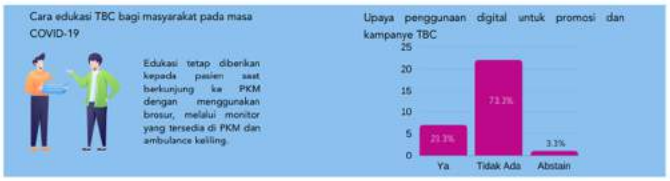

STPI BERSAMA PT. GARAM DAN BAZNAS SERAHKAN APD KE DINKES SUMENEP

Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini, seluruh perhatian seakan difokuskan kepada pencegahan dan penanganan pandemi sehingga

mengharuskan adanya penyesuaian terhadap pelayanan program kesehatan lainnya termasuk pelayanan tuberkulosis (TBC) yang dijalankan oleh Fasilitas Kesehatan Primer.

Di Kabupaten Sumenep diperkirakan terdapat 1.875 kasus TBC pada tahun 2019. STPI bersama bersama PT. Garam (Persero) dan Baznas Sumenep menyerahkan 8.300 pcs masker bedah dan 200 pcs masker N95 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur yang khusus diperuntukkan bagi pasien dan petugas TBC.

Hal ini dilakukan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar tetap memprioritaskan penyakit TBC dalam upaya pencegahan dan pengendalian TBC di Sumenep sehingga target eliminasi TBC tahun 2030 dapat tercapai.

Penyerahan Alat Pelindung Diri (APD) tersebut berlangsung di Pemkab Sumenep, Lantai II Graha Arya Wiraraja, Senin, 29 Juni 2020 pukul 10.00 WIB. Dalam kesempatan itu, A. Busyro Karim, selaku Bupati Sumenep mengatakan akan tetap memprioritaskan upaya pencegahan penularan TBC di Sumenep dan berharap agar penyebaran TBC juga menjadi perhatian penuh Pemerintah.

STPI DAN CISDI SALURKAN APD KE LOMBOK BARAT

Kabupaten Lombok Barat diperkirakan terdapat 2.510 orang yang terinfeksi TBC pada tahun 2019 lalu berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam layanan kesehatan, termasuk layanan orang yang terdampak TBC. Upaya untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan TBC harus tetap dilakukan sehingga

target dan capaian program TBC dapat tercapai.

STPI bersama dengan CISDI dan didukung oleh Solidaritas Berantas COVID-19 (SBC) memberikan bantuan APD untuk pencegahan dan pengendalian TBC pada masa pandemi COVID-19 melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan serah terima APD dilakukan pada Selasa, 07 Juli 2020 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Serah terima ini disaksikan oleh sejumlah OPD Pemerintah Kab Lombok Barat dan organisasi berbasis komunitas yang tergabung dalam Forum Kemitraan TBC di Kabupaten Lombok Barat. APD yang diserahkan berjumlah 5.830 paket yang terdiri atas masker bedah, masker N95, hazmat dan kacamata pelindung atau safety google. APD ini diharapkan memenuhi kebutuhan pasien dan Puskesmas untuk layanan TBC ditengah COVID-19.

BASELINE SURVEI TBC UNTUK RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SUMENEP DAN LOMBOK BARAT

STPI sedang memulai untuk mengembangkan program piloting di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Lombok Barat. Program ini memprioritaskan pada penguatan tata kelola TBC didaerah dengan memperkuat kebijakan, kelembagaan, dan perencanaan penganggaran TBC sehingga berdampak pada perubahan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat mengenai TBC. Program ini diharapkan menjadi model dan pendekatan baru dalam upaya pencegahan dan pengendalian TBC di Indonesia yang menekankan pada aspek penguatan kapasitas pemerintah menuju eliminasi TBC 2030.

Sebagai langkah implementasi program, maka dilakukan survey rumah tangga untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap TBC serta faktor - faktor yang mempengaruhinya. Survei rumah tangga ini bertujuan untuk (1) memperoleh data dasar mengenai

pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat mengenai TBC; (2) data dasar digunakan sebagai penyusunan ukuran capaian indicator keberhasilan program, (3) alat monitoring dan evaluasi program dan; (4). Data dasar sebagai bahan advokasi pada pemerintah daerah.

Kegiatan survey rumah tangga di Kabupaten Sumenep dilakukan pada 19 - 22 Agustus 2020 di 87 Desa di 16 Kecamatan di Kabupaten Sumenep dengan responden 410 orang. Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan pada: 19 - 22 Agustus 2020 dengan mengambil lokasi di 112 Desa di 10 Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dengan responden berjumlah 412 orang.

Pengumpulan data dilakukan oleh 10 enumerator di Kab Sumenep dan Kab Lombok Barat dengan menggunakan kuisioner dan hasilnya dikirimkan secara online melalui aplikasi KoboCollect.

Secara umum hasil dari survey rumah tangga ini menunjukkan sebagian besar masyarakat atau lebih dari 70% responden telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penyakit TBC, pengobatan dan pencegahannya. Demikian juga survey mengenai sikap responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pilihan sikap yang jelas (sangat setuju) terhadap tindakan yang bisa mengurangi risiko penularan TBC.

PEMBENTUKAN FORUM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TBC KABUPATEN SUMENEP

Pada Senin (24/8) di Kantor Bupati, Pemerintah Kabupaten Sumenep (Pemkab Sumenep) yang dikoordinasikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dan difasilitasi oleh STPI membentuk Forum Pencegahan dan Pengendalian TBC. Pembentukan Forum ini diiktiarkan sebagai salah satu langkah untuk menanggulangi peningkatan penyebaran TBC dan mencapai target eliminasi TBC di Indonesia melalui sinergi proaktif lintas sektor untuk terlibat dalam pencegahan dan pengendalian TBC di Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini dihadiri oleh 24 perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan komunitas baik di sektor kesehatan maupun non kesehatan seperti Medco Energi dan PT Pos Indonesia.

Kabupaten Sumenep menargetkan untuk eliminasi TBC di tahun 2025 dengan tahapan akselerasi-reduksi dan penemuan kasus secara bertahap. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain melalui Inovasi SABIT TBC (Siapapun Bisa Temukan dan Menjadi Pengawas Pasien TBC), penguatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif, penemuan kasus (berbasis

aplikasi), pengobatan, pelayanan dan pemantauan minum obat (PMO), pengendalian TBC di Puskesmas, RSUD, klinik pemerintah dan swasta, penguatan koordinasi di berbagai jenjang dengan membentuk Forum TBC, penguatan kemitraan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan dukungan dana untuk percepatan penanggulangan TBC.

Harapannya, dari pembentukan Forum Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis (TBC) yaitu agar dapat meningkatkan sinergi seluruh pihak untuk bekerjasama melakukan pencegahan dan pengendalian TBC sehingga angka pasien dan jumlah kasus di Kabupaten Sumenep dapat menurun di tahun-tahun selanjutnya. Sebab, kesadaran kolektif dari semua pihak adalah modal awal dalam pencegahan TBC di Kabupaten Sumenep untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2025. Pembentukan Forum TBC akan dilengkapi dengan Surat Keputusan dan deklarasi oleh Bapak Bupati Sumenep sebagai Penasihat Forum tersebut nantinya.

KAJIAN KAPASITAS DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN TBC KAB SUMENEP DAN LOMBOK BARAT

Kajian kapasitas daerah dalam menanggulangi TBC ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kapasitas kelembagaan lintas sektor di Kab Sumenep dalam upaya pencegahan dan pengendalian TBC; (2) mengetahui kebijakan TBC di daerah; (3) mendapatkan data dasar untuk merancang program dan kegiatan; (4). data dasar sebagai bahan advokasi pada pemerintah daerah dan (5). data dasar ini akan menjadi dasar penyusunan indikator keberhasilan kegiatan dan program. Hasil kajian ini akan menjadi baseline program bersama data hasil survey level rumah tangga, sehingga program ini memahami titik awal dari kondisi faktual di lapangan dan akan melakukan langkah perubahan kearah yang lebih baik.

Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Sumenep pada 25 - 31 Agustus 2020, sedangkan di Kabupaten Lombok Barat dilakukan pada 21 - 25 Agustus 2020. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara; (1) mengumpulkan data sekunder atau instansional dari sumber yang terpublikasi mengenai TBC di Kabupaten Sumenep (2) melalui wawancara semi terstruktur pada instansi sasaran. Adapun beberapa lembaga yang menjadi partisipan untuk diwawancarai antara lain: Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Komisi IV DPRD Kab Sumenep.

Hasil kajian kapasitas daerah dalam penanggulangan TBC di Kabupaten Sumenep menemukan beberapa fakta sebagai berikut: (1) secara epidemologis Kab. Sumenep merupakan wilayah risiko tinggi penyebaran TBC di seluruh kecamatan yang sebagian besar menjadi kantung TBC, terutama di wilayah daratan; (2) Belum ada peraturan maupun kebijakan daerah yang bisa menjadi dasar untuk perencanaan dan anggaran daerah untuk program TBC. Tidak adanya profil TBC bahan untuk menyusun strategi program TBC di Kabupaten yang akan melibatkan lintas sektor untuk upaya pencegahan dan pengendalian TBC, walaupun dukungan dan kesiapan untuk berkomitmen sudah dinyatakan oleh setiap OPD terkait; (3) Belum ada kelembagaan penanggulangan TBC yang signifikan mampu mengakomodir lintas sektor pada semua level termasuk pada level desa.

Sedangkan temuan di Kabupaten Lombok Barat antara lain: (1) Kebijakan TBC di Kabupaten Lombok Barat dituangkan dalam bentuk peraturan bupati sebagai payung hukum rencana aksi daerah (RAD) TBC. Namun demikian regulasi ini belum memiliki daya dongkrak untuk akselerasi program dan kegiatan TBC, karena tidak mampu mengungkit penganggaran yang cukup pada program TBC di daerah. (2) Forum TBC yang telah terbentuk membutuhkan penguatan kelembagaan melalui legalitas forum dalam bentuk Surat Keputusan Bupati untuk memperkuat kerja-kerja forum di Kabupaten Lombok Barat.

AUDIENSI DENGAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN

Audiensi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dilakukan dua kali, yaitu pada Senin, 7 September 2020, 10.00 WIB bertempat di Kantor Kepala Dinas Kesehatan dan Jum'at, 11 September 2020, 08.00 WIB bertempat di ruangan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

Saudara Sukri Bintaro, sebagai field officer STPI mewakili STPI untuk menjelaskan profil STPI dan program yang menjadi fokus STPI. Selain itu, dalam kesempatan ini STPI juga melakukan asesmen awal untuk menjajaki kemungkinan implementasi program di Kabupaten Pamekasan.

AUDIENSI DENGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kamis, 22 September 2020 pukul 09.30 - 09.45 WITA bertempat di kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTB dilakukan audiensi antara STPI yang diwakili field officer (FO), Lalu Hadi Irawan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi, S.PA.MPH.

Audiensi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan STPI dan program yang akan diimplikasikan di

Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, audiensi ini juga sebagai bagian dari upaya membangun kerjasama kemitraan lintas sektor dalam program TBC di Provinsi NTB.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB memberikan beberapa arahan, antara lain: (1) melakukan analisis masalah TBC di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan mencarikan solusi dalam kerangka koordinasi kelembagaan lintas sektor. (2) pada level desa perlu dibentuk satgas TBC untuk memperkuat kerja pencegahan dan pengendalian TBC di desa (3) membuat piloting program di level desa.

PERTEMUAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (OMS) KABUPATEN LOMBOK BARAT

Pada 18 Oktober 2020 difasilitasi STPI diselenggarakan pertemuan anggota Forum Pencegahan dan Pengendalian TBC Kab Lombok Barat yang berasal dari organisasi masyarakat sipil (OMS) dengan anggota Komisi IV DPRD Kab Lombok Barat dengan jumlah peserta pertemuan berjumlah 13 orang.

Hasil diskusi dalam pertemuan ini antara lain: (1) memperkuat pengetahuan anggota Forum (2) melakukan hearing dengan Sekretaris Daerah dan atau Bupati Kab. Lombok Barat (3) Memperjelas peran masing-masing anggota Forum dalam pencegahan dan pengendalian TBC.

PERTEMUAN STPI TB CENTER UNAIR DAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Pertemuan antara STPI, TB Center UNAIR dan Subdit TB Kementerian Kesehatan RI dilakukan di Aula Fakultas Kedokteran UNAIR pada 26 Oktober 2020. Pertemuan ini dihadiri oleh 26 orang yang mewakili TB Center UNAIR: Dekan FK Unair, Jajaran UPT FK UNAIR, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Wasor TBC Provinsi Jawa Timur, Kasubdit TBC Kementerian Kesehatan RI dan Direktur Eksekutif STPI.

Hasil dari pertemuan antara lain: (1) Penjajagan untuk aksi kolaborasi antara UNAIR dengan STPI di wilayah Madura (2) diperlukan untuk model asesmen intervensi di Madura dalam rangka eliminasi TBC tahun 2030.

AUDIENSI DENGAN BUPATI PAMEKASAN

Pada 27 Oktober 2020 dilakukan audiensi antara STPI dengan Bupati Kabupaten Pamekasan. Audiensi dilangsungkan di Kantor Bupati Kabupaten Pamekasan. Hadir dalam audiensi antara lain: Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan, Kepala Bidang P2M Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan, Wasor TBC Kab Pamekasan, Kasubdit TB Kementerian Kesehatan RI dan Direktur Eksekutif STPI.

Hasil pertemuan audiensi ini antara lain: (1) Bupati mengarahkan Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan untuk bisa segera berproses dengan STPI dengan membuat konsep program yang akan dilakukan, sekaligus membuat draf MoU antara Pemda Pamekasan dengan STPI. (2) Dinas kesehatan mengharapkan STPI bisa memaparkan konsep program yang akan di sinergikan dengan kebutuhan serta kondisi di Pamekasan.

DEKLARASI FORUM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TBC KABUPATEN SUMENEP

Kabupaten Sumenep telah membentuk Forum Kemitraan TBC berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep No. 118/417/KEP/435.013/2020 tentang Forum Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan TBC Kabupaten Sumenep. Untuk memperkuat peran forum, Bupati melakukan deklarasi forum kemitraan TBC yang melibatkan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC di Kab. Sumenep sesuai peran dan kapasitasnya masing-masing.

Deklarasi Forum dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020, Bupati Sumenep dalam

sambutannya memberikan arahan:
"Forum ini diharapkan bisa berfungsi untuk menggabungkan peran pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mencegah penyebaran penyakit TBC. Selain itu Camat juga harus mendukung program TBC dimana keterlibatan semua pihak dalam menanggulangi TBC dan dukungan anggaran yg cukup untuk mencapai target Sumenep Eliminasi TBC tahun 2024."

Deklarasi forum ditandai secara simbolis menekan tombol peresmian forum Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan TBC Kab Sumenep dan penyerahan Surat Keputusan Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumenep sebagai Ketua Forum. Kegiatan dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) Kab. Sumenep, Camat, Swasta, STPI dan CSO Lokal.

PERTEMUAN SOSIALISASI PROGRAM PAST KABUPATEN PAMEKASAN

Bertempat di Aula IBI Kabupaten Pamekasan, 30 November 2020 diselenggarakan sosialisasi program Penanggulangan TBC dengan pendekatan desa tematik TBC. Program ini memiliki fokus pendekatan klinis dan non klinis. Pada sisi klinis program akan berfokus pada temuan, investigasi kontak dan pengobatan yang bisa dikolaborasikan dengan layanan TBC dan Program Global Fund. Sedangkan disisi non klinis, akan memperkuat pada perencanaan program TBC di Desa, Kelembagaan TBC Desa dan kebijakan TBC di desa.

Pertemuan ini dihadiri oleh 44 orang yang merupakan perwakilan dari semua Puskesmas di Kab. Pamekasan, STPI dan Fakultas Kedokteran UNAIR Surabaya. Hasil kegiatan ini antara lain: (1) Puskesmas sangat mendukung program TBC yang melibatkan lintas sektor (2) Program ini akan dilanjutkan ke proses MoU dengan Pemda Pamekasan dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan (3) UNAIR akan terlibat dalam mendukung program di Kab. Pamekasan (4) program Desa Tematik TBC akan dibahas lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan.

WORKSHOP PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG TBC DI PESANTREN

Dalam rangka mengembangkan program TBC di pesantren yang telah dilakukan oleh STPI sejak tahun 2019, pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di aula Dinas Sosial Kab. Sumenep dilaksanakan workshop dengan mengundang pengasuh dan pengurus pesantren terpilih yang akan menjalankan program TBC di pesantren. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penyakit TBC, mencegah penularan, menemukan kasus dan mendampingi pengobatan bagi santri yang sakit TBC.

Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Sumenep yang memberikan arahan tentang pentingnya peran pesantren dalam upaya mewujudkan eliminasi TBC di Sumenep tahun 2024. Peserta yang hadir sebanyak 25 orang yang mewakili 10 pesantren di Kab Sumenep, dengan narasumber dr. Andri Dwi Wahyudi Sp.P dari IDI Sumenep.

Hasil kegiatan ini adalah (1) pengurus pesantren menyambut baik program TBC ini bisa dilakukan di pesantren dan akan menyampaikan hal ini kepada pengasuh sebagai pengambil keputusan (2) pembentukan poskestren di semua pesantren dengan dukungan dari Pemda dan Dinas Kesehatan (3) menyusun rencana kegiatan TBC di masing-masing pesantren seperti pelatihan kader santri laki-laki dan perempuan.

WORKSHOP PEMBAHASAN KONSEP PROFIL TBC KABUPATEN SUMENEP

Bertempat di Aula Dinas Sosial Kab. Sumenep pada tanggal 2 Desember 2020 diselenggarakan workshop pembahasan konsep profil TBC Kab Sumenep. Profil TBC ini diharapkan memiliki tiga fungsi (1) menjadi informasi dasar program TBC

di Kab. Sumenep (2) profil TBC digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana strategis TBC Kab. Sumenep dan (3) sebagai alat dalam melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan.

Dalam arahannya Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumenep menegaskan "profil ini harus segera diselesaikan, dan proses penyusunannya di koordinir oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan lintas sektor. Dukungan semua pihak berkaitan dengan data dan informasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan profil yang di targetkan selesai pada akhir tahun 2020.

Pertemuan ini dihadiri oleh 25 orang mewakili OPD, CSO dan swasta yang merupakan anggota gugus tugas dari forum TBC Kab. Sumenep. Hasil kegiatan ini antara lain: (1) Ditetapkannya jadwal pertemuan dan pembahasan konsep profil berdasarkan tahapan yang diusulkan oleh STPI (2) peran dari masing-masing OPD untuk berkontribusi dalam penyusunan profil terutama terkait data-data yang dibutuhkan.

PROGRAM ACE TB CFCS

PROGRAM HIBAH ACE

AFFECTED COMMUNITIES EMPOWERMENT TO END TB

PROGRAM HIBAH ACE

AFFECTED COMMUNITIES EMPOWERMENT TO END TB

TRANSFORMASI UPAYA MENGAKHIRI TBC DENGAN RESPON BERBASIS KOMUNITAS, HAM DAN GENDER

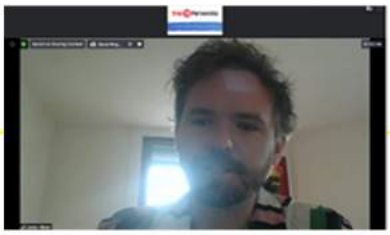

Pada Jumat, 14 Agustus 2020, STPI bersama dengan POP TB Indonesia menyelenggarakan 'Sosialisasi Program Pemberdayaan Komunitas Terdampak TBC untuk Mengakhiri TBC'. Dalam pertemuan ini STPI dan POP TB meluncurkan program kerja sama untuk program ACE-TB (Affected Communities Empowerment to End TB). Kerja sama ini didukung dengan mekanisme dana hibah Challenge Facility for Civil Society (CFCS) dari Stop TB Partnership dan UNOPS dengan dukungan Global Fund AIDS, Tuberculosis, and Malaria dan USAID. Stop TB Partnership menerima 252 proposal CFCS 2019 dan menyalurkan dukungan sebesar 2.5 juta USD untuk 31 organisasi masyarakat sipil dari manca negara 2020-2021.

CFCS Round 9 bertujuan untuk mentransformasi respon terhadap permasalahan TBC dengan peran komunitas, berbasis HAM, dan kesetaraan gender. Di Indonesia, STPI dan POP TB memanfaatkan CFCS Round 9 untuk memastikan masyarakat sipil berkontribusi pada upaya eliminasi TBC 2030 melalui pemberdayaan dan peningkatan partisipasi komunitas terdampak TBC secara bermakna.

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini dihadiri oleh hampir 50 orang perwakilan organisasi mitra STPI dan POP TB. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dari Ibu Heny Akhmad, selaku Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia, yang mengingatkan kembali komitmen Indonesia mencapai target dari Deklarasi Politis tentang TBC yang diluncurkan di Sidang Umum PBB, 26 September 2018.

"... target terdekat di tahun 2022 adalah mengoptimalkan layanan TBC agar respon kita lebih terintegrasi, berpusat pada manusia, berbasis komunitas, responsif gender dan berbasis HAM. Harapannya, program ini dapat mendorong kita agar maju bersama-sama sebagai mitra yang setara untuk eliminasi TBC di Indonesia."

Heny Akhmad
Direktur Eksekutif
Stop TB Partnership Indonesia

Adapun narasumber dalam kegiatan ini antara lain: Kepala Subdirektorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Imran Pambudi, MPHM, Budi Hermawan selaku Ketua POP TB Indonesia, Genia Teresia dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Ibu Dewi Wulan dari Yayasan TERJANG Jawa Barat dan James Malar dari Stop TB Partnership.

STPI DAN POP TB TINGKATKAN KAPASITAS ORMAS TERDAMPAK TBC MELALUI SOSIALISASI DAN KONSULTASI SWAKELOLA TIPE III

Swakelola merupakan salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, bekerja sama dengan unit pemerintah lain atau melibatkan kelompok masyarakat (pokmas). Cara ini sudah lama dilakukan pemerintah, namun tipe swakelola dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan hal yang baru. Dalam pengadaan barang/jasa, ormas memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan pemerintah maupun penyedia swasta. Keunggulannya terletak dalam pendekatan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang tidak diminati pelaku usaha.

Perpres 16 Tahun 2018 telah memberikan payung hukum keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yakni Yayasan dan Perkumpulan, dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah, yakni melalui Swakelola Tipe III atau swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola. Ketentuan lebih lanjut mengenai swakelola kemudian diatur dengan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Dalam konteks pencegahan dan pengendalian TBC terdapat beragam program kegiatan pemerintah yang bisa dikolaborasikan dengan organisasi masyarakat terutama organisasi komunitas TBC. Pada sisi

yang lain Komunitas TBC memiliki kapasitas penjangkauan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat eliminasi TBC serta memiliki keunggulan dalam pendampingan masyarakat terutama yang terdampak TBC.

Berkaitan dengan kebutuhan diatas, maka STPI bekerjasama dengan POP TB Indonesia, dengan dukungan pendanaan dari Stop TB Partnership menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi mengenai swakelola tipe III.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman jaringan POP TB di daerah dan mitra pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) sehingga mampu membangun kolaborasi dalam program kegiatan TBC di daerah.

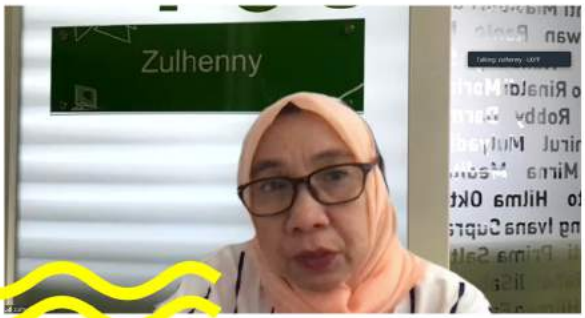

Kegiatan dilaksanakan secara virtual pada 24 September 2020 pukul 08.00 -12.00 WIB dengan narasumber Ir. Zulhenny, M.Dev Planning (Kasubdit Pengadaan Barang dan Jasa) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun peserta kegiatan berjumlah 40 orang dengan komposisi; laki-laki 19 orang dan perempuan berjumlah 21 orang.

Pada akhir kegiatan dilakukan sesi survei penilaian pemahaman peserta pasca kegiatan sosialisasi swakelola tipe III. Hasil survei menunjukkan 60% peserta menyatakan materi tentang swakelola tipe III sangat relevan untuk organisasi dan 40% peserta mengungkapkan bahwa materi yang disampaikan relevan untuk pengembangan organisasi. Sedangkan untuk peningkatan pemahaman mengenai swakelola tipe III, 72% peserta menyatakan meningkat pemahamannya setelah mendapatkan sosialisasi dan 24% merasakan peningkatan pemahaman yang sangat besar setelah mengikuti kegiatan sosialisasi swakelola tipe III.

STPI DAN POP TB GELAR LOKAKARYA DEMI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER

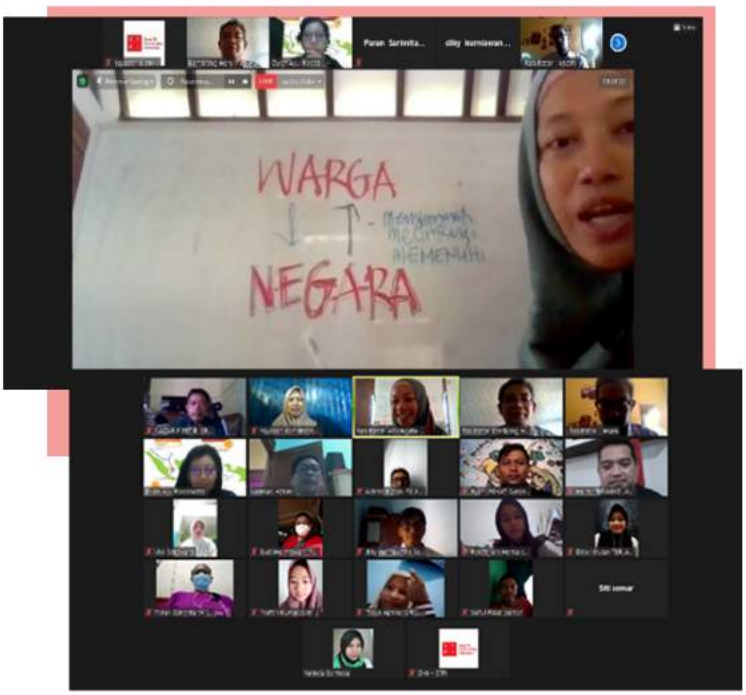

Hadirnya pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru dalam upaya mencapai target eliminasi TBC di Indonesia tahun 2030. Cepatnya penularan COVID-19 membuat respon terhadap COVID-19 menjadi fokus utama kegiatan pemerintah dibandingkan dengan penyakit menular lainnya, termasuk penyakit TBC.

Upaya strategis diperlukan untuk mendorong proses eliminasi TBC pada tahun 2030 bisa dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Salah satu nya adalah dengan memperkuat perencanaan penganggaran pada pemerintah daerah dengan prioritas penanganan TBC yang responsif gender.

STPI bekerjasama dengan Stop TB Partnership dan POP TB Indonesia menyelenggarakan kegiatan Lokakarya virtual tentang perencanaan penganggaran responsif gender pada 28-29 Oktober 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi penggiat TBC di seluruh Indonesia dalam advokasi perencanaan penganggaran TBC yang responsif gender. Hasil yang diharapkan dalam rangkaian kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman organisasi komunitas penggiat TBC mengenai perencanaan penganggaran TBC yang responsif gender sehingga organisasi penggiat TBC mampu melakukan advokasi perencanaan penganggaran TBC di di daerah.

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif STPI, Heny Akhmad menyampaikan,

"Kelompok perempuan, minoritas dan kelompok rentan seringkali mendapatkan hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang disebabkan oleh norma dan budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan layanan kesehatan yang memenuhi aspek kesetaraan gender. Selain itu, Layanan dengan kesetaraan gender akan memberikan daya ungkit untuk mewujudkan target-target kesehatan (health outcomes)."

Dengan mengutip hasil penelitian, Heny Akhmad menambahkan bahwa stigma pada perempuan, rendahnya akses dan kontrol perempuan terhadap pengelolaan sumberdaya kesehatan berkorelasi terhadap diagnosis dan keberhasilan pengobatan TBC.

Lokakarya ini menghasilkan 18 orang peserta yang berasal dari organisasi pasien TBC yang mengikuti kegiatan ini mampu memahami pentingnya pengarusutamaan dalam perencanaan penganggaran, dimana isu tersebut menjadi hal baru bagi organisasi pasien TBC. Wasingatu Zakiyah selaku narasumber menekankan bahwa setiap orang memiliki hak atas anggaran oleh karena kita perlu berjuang untuk mendapatkan hak tersebut.

LOKAKARYA SENSITISASI KONTEN NSP DAN PROPOSAL GF

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020 dengan melibatkan anggota jaringan POP TB. Narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Subdit TB yang memaparkan NSP dan STPI-Penabulu yang memaparkan kegiatan-kegiatan Global Fund untuk periode 2021 – 2023. Lokakarya ini dibuka oleh Heny Akhmad selaku Direktur Eksekutif STPI.

Tujuan dilakukannya lokakarya ini antara lain: (1) Memperluas wawasan jejaring anggota POP TB mengenai NSP dan intervensi yang akan dilaksanakan periode 2021 – 2023 (2) Menambah wawasan jejaring POP TB Indonsia terhadap NSP dan Proposal GF (3) mensosialisasikan NSP dan Proposal GF terutama isu Community Right & Gender (CRG).

Sebagai hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya Rencana Strategis Nasional (National Strategic Plan/NSP). Buku Saku sebagai media untuk menyederhanakan dari NSP dan ringkasan kegiatan GF adalah merupakan salah satu keluaran dari kegiatan ini.

FINALISASI RENCANA STRATEGIS POP TB

Salah satu target dari program Hibah ACE CFCS adalah memperkuat POP TB dengan jaringan penyintas TBC tingkat regional dan global. Selain melalui serangkaian pelatihan advokasi pada beragam isu, penguatan kelembagaan POP TB dan jaringannya juga menjadi sasaran dari program dukungan Stop TB Partnership ini.

Upaya yang dilakukan untuk penguatan organisasi POP TB melalui pendanaan ini adalah penyusunan rencana strategis (RENSTRA) POP TB untuk periode 2021-2025. Penyusunan renstra POP TB dilakukan Oktober-Desember 2020 dengan menggunakan pendekatan bottom up dengan metode focus group discussion (FGD) yang melibatkan jejaring POP TB.

Rangkaian FGD yang dilakukan dalam

proses penyusunan renstra POP TB ini menghasilkan pemetaan masalah pada level pasien TBC, internal organisasi dan situasi eksternal yang mempengaruhi kerja-kerja penanggulangan TBC.

Hasil pemetaan masalah digunakan untuk merumuskan strategi intervensi dan pengembangan organisasi selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Kegiatan penyusunan rencana strategis POP TB difasilitasi oleh Yenti dan Ajeng dari Sekretariat Nasional FITRA.

Dalam memperkuat kualitas penyusunan rencana strategis, POP TB menyelenggarakan lokakarya penyusunan rencana strategis kolaborasi TB-HIV. Lokakarya bertempat di TerasKita Hotel pada tanggal 9 – 12 November 2020, dengan tujuan (1) Tersedianya kerangka perubahan untuk menurunkan stigma dan diskriminasi, serta agenda advokasi terhadap hambatan komunitas dalam mengakses layanan dan berkualitas yang berpusat pada manusia. (2) Mendorong upaya pemerintah dalam skala isu-isu prioritas (3) Membangun advokasi jejaring penyintas TBC dan HIV dalam upaya penanggulangan program TB/HIV di Indonesia.

MEMBANGUN MEKANISME KOMUNIKASI/KOORDINASI ANTARA ANGGOTA CCM PERWAKILAN KOMUNITAS DENGAN KONSTITUEN

Pertemuan dengan tajuk "Membangun dan Menjaga Mekanisme Advokasi Jejaring POP TB" diselenggarakan pada 17 Oktober 2020 oleh POP TB dengan pendanaan melalui program ACE CFCS. Dalam pertemuan ini, POP TB Indonesia memfasilitasi diskusi dan masukan antara anggota CCM perwakilan komunitas terdampak TBC dengan konstituen yang merupakan komunitas penyintas dan terdampak TBC jejaring POP TB dari 18 organisasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk (1) Membangun jalur komunikasi yang jelas antara perwakilan dari penyintas TBC dan konstituen/anggota perwakilan POP TB di dalam CCM (2) Menampung aspirasi, masukan, dari komunitas dan menyampaikannya di forum TWG TB saat rapat CCM dan (3) Mengawal proposal GF ATM untuk Indonesia

Pertemuan ini mengundang anggota CCM perwakilan ODHA dan perwakilan CSO untuk berbagi informasi, pengalaman dan pembelajaran terkait mekanisme komunikasi dan koordinasi antara anggota CCM perwakilan komunitas dari kelompok isu HIV dengan konstituennya.

PEMBUATAN WEBSITE POP TB INDONESIA DAN 8 WEBSITE ORGANISASI JEJARING POP TB

Salah satu indikator capaian program ACE TB adalah dikembangkannya website yang diperuntukan bagi POP TB Indonesia dan 3 organisasi anggota POP TB. Pada November 2020 POP TB berhasil mengembangakan 8 website yang antara lain:

1. Website POP TB Indonesia, www.poptbindonesia.org
2. Website Panter Malang, www.pantertbmalang.org
3. Website Sekawans Jember, www.sekawantbjember.org
4. Website TERJANG Jabar, www.terjangtbjabar.org
5. Website SEMAR Jateng, www.semartbjateng.org
6. Website REKAT Surabaya, www.rekatsurabaya.org
7. Website PESAT Medan, www.pesatSumut.org
8. Website PETA Jakarta, www.petaJakarta.org

PENGEMBANGAN JAPJA

PENGEMBANGAN JEJARING DAN ADVOKASI

PENGEMBANGAN JEJARING DAN ADVOKASI

ADVOKASI KEBIJAKAN UNTUK DUKUNGAN UPAYA ELIMINASI TBC KEPADA PIMPINAN KOMISI IX DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

STPI bersama Global TB Caucus Wilayah Asia Pasifik mengadvokasi pentingnya keterlibatan Pimpinan Komisi IX DPR RI 2020-2024 dalam mendukung upaya Eliminasi TBC 2030 yang telah dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo. Pada Februari 2020, STPI dan Global TB Caucus bertemu dengan H. Ansory Siregar, Lc dan Melki Laka Lena serta Nihayatul Wafiroh di DPR RI.

Direktur Eksekutif STPI mengutarakan situasi TBC di Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun dengan meningkatknya notifikasi kasus TBC yang mengindikasikan lebih banyak orang dengan TBC yang mengakses pelayanan kesehatan. Akan tetapi, upaya-upaya saat ini belum berhasil menurunkan estimasi angka kejadian dan kematian akibat TBC secepat yang diharapkan untuk mengejar target Eliminasi TBC 2030.

Salah satu hambatan struktural yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan TBC adalah kesenjangan dalam

membiayai respon TBC secara optimal dengan teknologi dan obat-obatan terkini (WHO SEARO, 2018). Oleh sebab itu, diperlukan dukungan multi-sektor, khususnya DPR RI, untuk memastikan sumber daya domestik dapat mendukung akselerasi penanggulangan TBC di Indonesia.

Pertemuan audiensi ini ditindaklanjuti dengan mengirimkan beberapa lembar kebijakan tentang pentingnya sinergi multi-sektor (Februari), penanggulangan TBC resisten obat (April), dan dampak COVID-19 (Juli) kepada Komisi IX DPR RI melalui sekretariat komisi. Pelibatan pimpinan maupun anggota serta tenaga ahli Komisi IX DPR RI dilanjutkan dalam webinar tentang TBC dan COVID-19 (Mei) serta National TB Summit (November).

Beberapa keputusan Komisi IX DPR RI yang berdampak positif pada upaya penanggulangan TBC adalah: 1) Desakan kepada Kementerian Kesehatan tentang penanganan TBC, termasuk untuk tidak merealokasi anggaran TBC dalam APBN 2020, dalam risalah RDP 14 April 2020 dan 2) Menyetujui perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan RI 2021 dimana dukungan APBN terhadap program TBC meningkat 100%.

ADVOKASI KEBIJAKAN MITIGASI DAMPAK COVID-19 TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DAERAH

Dalam mendorong upaya mitigasi dampak COVID-19 terhadap penanggulangan TBC di Indonesia, STPI memprakarsai diskusi yang bertajuk, "Mitigasi Dampak COVID-19 Terhadap Upaya Penanggulangan TBC" antara Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes RI

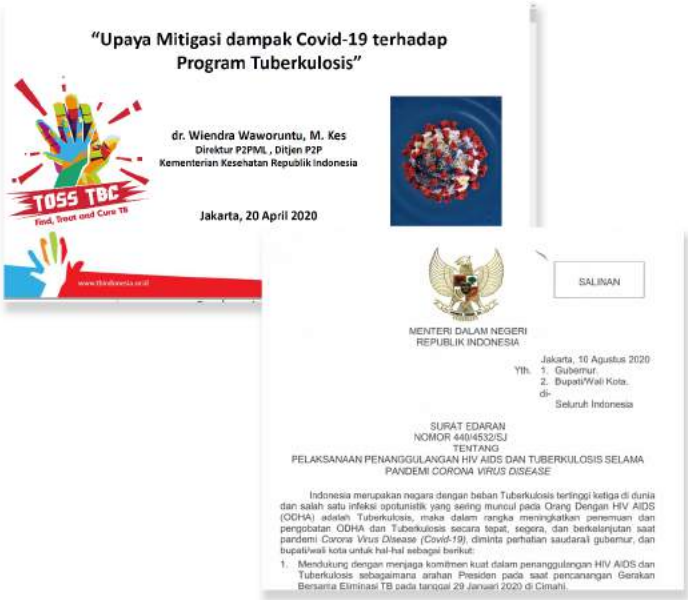
"Upaya Mitigasi dampak Covid-19 terhadap Program Tuberkulosis"

dr. Wiendra Waworuntu, M. Kes
Direktur P2PML , Ditjen P2P
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jakarta, 20 April 2020

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Agustus 2020

Yth. 1. Gubernur,
2. Bupati/Wali Kota,
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 440/4532/SJ
TENTANG
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HIV AIDS DAN TUBERKULOSIS SELAMA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*

Indonesia merupakan negara dengan beban Tuberkulosis tertinggi ketiga di dunia dan salah satu infeksi opotunistik yang sering muncul pada Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) adalah Tuberkulosis, maka dalam rangka meningkatkan penemuan dan pengobatan ODHA dan Tuberkulosis secara tepat, segera, dan berkelanjutan saat pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), diminta perhatian saudara/i gubernur, dan bupati/wali kota untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung dengan menjaga komitmen kuat dalam penanggulangan HIV AIDS dan Tuberkulosis sebagaimana arahan Presiden pada saat pencanangan Gerakan Bersama Eliminasi TB pada tanggal 29 Januari 2020 di Cimahi.

dan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Kemendagri pada Senin, 20 April 2020. Pertemuan diskusi daring ini dihadiri oleh dr. Wiendra Waworuntu (Direktur P2PML, Kemenkes), dr. Imran Pambudi (Kasubdit Tuberkulosis, Kemenkes), Dr. Eduard Sigalingging (Direktur SUPD III), Bapak Arifin Hutagalung (Kasubdit Kesehatan, Kemendagri), serta Dewan Penasihat STPI.

Dalam pertemuan tersebut STPI dan Kementerian Kesehatan mengadvokasi pentingnya kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah Daerah tetap mengupayakan keberlangsungan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tuberkulosis di masa pandemi. Salah satu rencana tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah menerbitkan surat edaran kepada Pemerintah Daerah.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan mengirimkan memo kebijakan secara daring tentang bagaimana kebijakan terkait COVID-19 dapat dioptimalkan untuk penanggulangan TBC (April) dan menyelenggarakan webinar tentang SPM TB di masa pandemi bersama Asosiasi Dinas Kesehatan (Mei).

Pada Agustus 2020, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran nomor 440/4532/SJ tentang Pelaksanaan Penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkulosis selama Pandemi Corona Virus Disease. Surat tersebut disebarkan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di 514 kabupaten/kota.

APRIL 2020

Kebijakan Merespon COVID-19 Dapat Mendukung Pelayanan Kesehatan dan Pasien Tuberkulosis

S T P I

1) Instruksi Mendagri No. 1/2020

Refocusing anggaran untuk:
a. Penanganan kesehatan
b. Dampak ekonomi
c. Jaring pengaman sosial

Dalam masa pandemi, Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan termasuk 'Pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis'.

Ketentuan ini dapat dilakukan dengan arahan bahwa penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD 2020 dapat diprioritaskan Pemda untuk 'Penanganan kesehatan lainnya' (di hal. 2 Lampiran)

Penyediaan Jaring pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk hibah/bansos uang atau barang kepada:
- Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin, sektor informal dan individu/masyarakat yang memiliki risiko sosial akibat terdampak oleh COVID-19

Rumah tangga pasien TBC dengan anggota keluarga yang kehilangan pendapatan/pekerjaan akibat COVID-19 dapat mengakses JPS melalui program pemerintah.

3) Peraturan Menteri Desa PDTT No.6/2020

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan yang terdapat dalam DTKS, tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2) Peraturan Menteri Sosial No.1/2018

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Program untuk keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memiliki salah satu/lebih kondisi di bawah ini:

(1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a. ibu hamil/menyusui; dan
b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

(2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan

(3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun;
b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Rumah tangga pasien TBC dengan kondisi tersebut dapat menghubungi RT/RW, aparatur Desa/Kelurahannya agar didaftarkan di DTKS

Call center PKH : 1500 299
Website PKH : https://pkh.kemsos.go.id/

Rumah tangga dengan pasien TBC/TBC resisten obat yang memenuhi persyaratan tersebut dapat mengakses BLT-Dana Desa karena TBC adalah penyakit kronis dan pengobatan TBC membutuhkan waktu 6 bulan hingga 2 tahun (Kepmenkes No. 364/2009 tentang pedoman penanggulangan TBC; Permenkes No.67/2016 tentang penanggulangan TBC).

SURVEI MONITORING PROTOKOL PELAYANAN TBC DI MASA PANDEMI COVID-19

Kolaborasi Stop TB Partnership Indonesia bersama Kementerian Kesehatan RI, Perhimpunan Organisasi Pasien TB, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, dan 'Aisyiyah melakukan survei monitoring implementasi protokol pelayanan TBC di masa pandemi COVID-19. Pada tanggal 18-26 Mei 2020. Partisipan survei monitoring ini berasal dari bermacam lapisan masyarakat dan institusi pelayanan kesehatan seperti manajer program TBC kabupaten, program TBC fasilitas PMDT, program TBC di puskemas, kader, dan pasien TBC RO yang mendapat dukungan dari jaringan POP TB dengan jumlah lebih dari 4000 responden.

Tujuan dari survei ini adalah untuk memantau implementasi protokol TBC selama pandemi COVID-19 di tingkat kabupaten/kota, apa saja tantangan yang masih ada, dan rekomendasi responden untuk pemerintah kabupaten/kota dan nasional. Informasi ini digunakan sebagai masukan untuk protokol, advokasi, dan strategi program untuk mengatasi tantangan di tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, beberapa aspek protokol telah diterapkan secara tepat termasuk jaga jarak fisik di fasilitas kesehatan oleh semua responden, pasien dan kader yang memakai masker di fasilitas kesehatan, penggunaan PPE oleh petugas kesehatan. Hal ini sudah menjadi perhatian Kepala Subdirektorat Tuberkulosis Kemenkes RI, yg mempresentasikan hasil survei ini pada hari Selasa melalui webinar yang difasilitasi oleh USAID TB PS kepada lebih dari 300 peserta pejabat kesehatan kabupaten/kota, penyedia layanan kesehatan swasta dan anggota organisasi profesi kesehatan.

Setelah hasil survei diterjemahkan ke dalam versi Bahasa Inggris kemudian disampaikan kepada beberapa jaringan NGO internasional (Stop TB, Global TB Caucus, RESULTS, The Union). Semua pihak menyampaikan apresiasi karena upaya bersama ini menjadi model

akuntabilitas untuk program TBC terutama di situasi pandemi. Menurut yang mereka ketahui di negara lain belum ada yang melakukan hal semacam ini bersama-sama antara Pemerintah & masyarakat sipil. Mereka mengapresiasi kekompakan dari NTP, Organisasi Masyarakat Sipil beserta komunitas TBC di Indonesia.

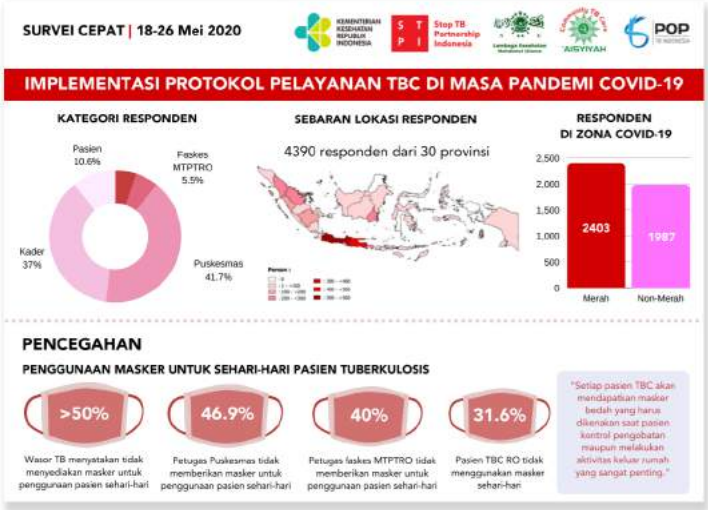

STPI MENDORONG ISU TBC DAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM AGENDA G20 INDONESIA

Sherpa G20 Indonesia (Deputi VII Kemenkoekuin) menerima audiensi Stop TB Partnership Indonesia bersama Dewan Penasihat STPI, dan Koordinator Regional Global TB Caucus Asia Pasifik pada Agustus 2020 untuk mengadvokasi Indonesia memajukan agenda eliminasi TBC 2030 pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20.

STPI memaparkan bahwa 50% beban penyakit TBC berada di 6 negara G20. Dengan komitmen serta aksi yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi eliminasi TBC 2030 terutama melalui rancangan Peraturan Presiden, tentunya Indonesia dapat menjadi contoh positif untuk mendorong koordinasi dan aksi multi-sektor di negara lainnya. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia perlu memastikan obat-obatan dan teknologi diagnosis TBC yang terkni dapat tersedia dan terjangkau oleh semua negara pada masa/pasca pandemi.

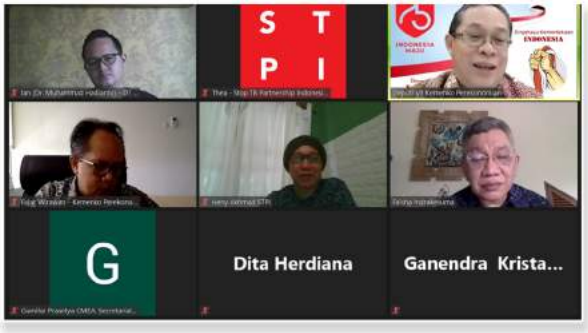

Sherpa G20 menyampaikan dukungannya untuk STPI lebih keras menyuarakan isu TBC baik melalui sekretariat Sherpa G20 maupun Kementerian Kesehatan. Hal tersebut dapat diwujudkan pada 2021 dimana STPI diharapkan berpartisipasi dalam *voyage* menuju Presidensi G20 Indonesia pada 2022 (1 tahun sebelum rencana Sidang Umum PBB tentang TBC kedua) dan sebagai tuan rumah ASEAN pada 2023.

DUKUNGAN UNTUK ATASI HAMBATAN AKSES PENDAMPINGAN PENGOBATAN PASIEN TBC RESISTAN OBAT DI MASA PANDEMI

Peningkatan jumlah orang yang terjangkit Covid-19 di Indonesia, berdampak pada optimalisasi semua sumber daya kesehatan untuk mampu mengatasi dan mencegah penularannya. Penanggulangan TBC menjadi salah satu dampak tidak langsung situasi tersebut. Sebagian pasien TBC mengeluhkan bahwa tingkat kesibukan fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan dalam menangani Covid-19 telah mempengaruhi layanan TBC termasuk pengobatan dan diagnosis. Orang dengan TBC dan keluarga juga mengalami keterbatasan untuk mengakses layanan kesehatan akibat adanya pembatasan sosial. Demikian juga dengan mekanisme dukungan sosial yang diberikan kepada pasienpun menjadi sangat terbatas karena semua pihak diharuskan untuk berjarak dan menghindarkan kontak secara langsung.

Stop TB Partnership Indonesia (STPI) bekerjasama dengan POP TB dan LKNU membangun program bersama dukungan smartphone pada penderita TBC RO dengan kriteria tertentu dan pendamping pasien untuk efektifitas pemantauan dimasa pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pemantauan dan pendampingan selama masa pandemi Covid-19.

Kick off program dukungan *smartphone* untuk TBC RO ini dilaksanakan pada 10 September 2020 Jam 13.00 – 16. 30 WIB. Kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan jumlah peserta 51 orang yang terdiri dari laki-laki 28 orang dan perempuan 23 orang.

Kegiatan ini dibuka oleh Ibu dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid selaku Direktur P2PML (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung). Selain itu, untuk memperkuat pengetahuan peserta, ada beberapa pemaparan materi dari antara lain : (1) Tantangan dalam pemantauan TBC selama pandemi Covid 19 disampaikan oleh dr. Imran Pambudi, MPHM (Kasubdit TBC Kemenkes RI); (2) Kolaborasi lintas sektor dalam pemantauan virtual TBC RO: Peluang dan tantangan disampaikan oleh Dr. Carmelia Basri, M. Epid (3) ONE IMPACT sebagai instrument untuk pemantauan pasien TBC RO, Dr. Esty Febriani, M. Kes (TB Technical Advisor LKNU) dan; (4) Rencana kerja Program Penguatan Pemantauan Kepatuhan Pengobatan Pasien TBC RO selama pandemi Covid-19, disampaikan oleh Budi Hermawan (Ketua POP TB Indonesia).

Respon positif terhadap program ini diberikan oleh peserta, seperti dalam kutipan berikut : Ns. Antik Rachmawati. P (Pengelola Program TBC Dinkes Prov. DKI)

"Dapat memberikan solusi bagi permasalahan pasien TBC dengan tepat sasaran, tepat metode dan tepat waktu."

Meirinda Sebayang (Ketua Jaringan Indonesia Positif) "Kegiatan yang sangat baik untuk meningkatkan kolaborasi komunitas, layanan dan pemerintah untuk program TBC Nasional."

SURVEI PEMAHAMAN MITRA MENGENAI ADVOKASI

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan TBC penting untuk dilakukan karena masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran yang khusus. Adanya sinergi dan kolaborasi antar para pemangku kepentingan akan memperbesar peluang tercapainya target eliminasi TBC di Indonesia tahun 2030.

Salah satu faktor kunci dalam mendorong terjadinya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan TBC adalah advokasi. Advokasi dapat menjembatani ketimpangan informasi dan meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan, sehingga tercipta lingkungan kebijakan yang responsif TBC dan upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menyadari adanya perbedaan pengalaman dan tantangan setiap anggota forum yang berperan dalam melakukan akselerasi upaya eliminasi TBC, Stop TB Partnership Indonesia (STPI) berinisiatif untuk menghimpun informasi dasar terkait pemahaman dan upaya anggota forum dalam melakukan advokasi isu TBC serta mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi masing-masing anggota forum di wilayah kerjanya. Informasi-informasi yang diperoleh akan menjadi landasan bagi STPI untuk berkontribusi dalam mengonsolidasikan pemahaman dan upaya anggota forum dalam advokasi sehingga target eliminasi TBC di Indonesia pada tahun 2030 dapat tercapai.

Kegiatan survei pemahaman peran dan upaya anggota forum dalam advokasi penanggulangan tuberkulosis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan; pelaksanaan; dan penyusunan laporan. Ketiga tahapan tersebut diselesaikan dalam waktu sembilan minggu, dengan rentang waktu minggu ke-4 Juli hingga minggu ke-4 September 2020.

Informan survei terdiri dari 41 organisasi yang terlibat sebagai anggota dalam forum TBC nasional dan memiliki kegiatan yang spesifik terkait TBC, di luar pemerintah, mitra internasional, dan individu. Organisasi anggota forum yang menjadi informan dalam survey ini termasuk ke dalam kategori organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, asosiasi layanan kesehatan publik dan swasta, dan institusi akademis dan penelitian.

Hasil survei menunjukkan bahwa advokasi dalam penanggulangan TBC, oleh anggota FSTPI, dilakukan pada berbagai ranah, mulai dari komunitas, sektor swasta, Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Nasional. Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan advokasi yang dilakukan masih bersifat sporadis, tidak terkoordinasi melalui kemitraan TBC nasional. Hal ini tidak terlepas dari belum dijadikannya advokasi penanggulangan TBC sebagai kegiatan utama oleh organisasi-organisasi anggota FSTPI.

Meskipun belum terkoordinasi melalui kemitraan TBC nasional, pengalaman serta kapasitas organisasi-organisasi anggota FSTPI dapat menjadi potensi untuk disinergikan melalui kolaborasi untuk upaya advokasi penanggulangan TBC di Indonesia. Hanya saja, sebelum mencapai kolaborasi yang ideal, FSTPI perlu mengatasi terlebih dahulu hambatan-hambatan yang muncul dalam kemitraan TBC nasional, seperti tidak aktifnya anggota forum.

Guna menciptakan iklim kolaborasi yang kondusif bagi upaya advokasi dalam penanggulangan TBC, terdapat tiga rekomendasi strategis yang dapat dilakukan STPI sebagai sekretariat FSTPI. Rekomendasi tersebut antara lain:

1. Melakukan evaluasi kinerja forum sebagai dasar dari penataan forum. Penataan forum dapat merujuk pada skema yang ditawarkan Stop TB Partnership dan WHO dalam membangun kemitraan.
2. Melakukan konsolidasi pemahaman advokasi dalam penanggulangan TBC.
3. Membangun diskusi tentang pengidentifikasian isu-isu strategis yang dapat menjadi agenda kerja bersama anggota FSTPI dalam

melakukan advokasi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

PERTEMUAN VIRTUAL TBC NASIONAL 2020

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan TBC cukup kuat sepanjang tahun 2020, hal ini dibuktikan dengan adanya Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024 dan berlangsungnya proses perumusan Peraturan Presiden tentang percepatan eliminasi TBC. Namun demikian hadirnya pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap penanggulangan TBC secara nasional. Oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari eksekutif dan legislatif, sektor swasta, dan komunitas dalam pencegahan dan pengendalian TBC di Indonesia.

Kolaborasi dan akuntabilitas antara eksekutif dan legislatif, sektor swasta, dan komunitas dapat meningkatkan peluang pencapaian tujuan bersama, yaitu eliminasi TBC di Indonesia tahun 2030. Terwujudnya kolaborasi ini akan memperkuat kemitraan multipihak dalam menyediakan layanan kesehatan yang berpusat pada orang terdampak TBC, membangun lingkungan yang mendukung, memberdayakan komunitas, dan mengakselerasi penelitian dan inovasi untuk membangun respon TBC yang lebih kuat untuk menghadapi COVID-19 dan pandemi lainnya di masa depan.

Dalam rangka memperkuat upaya multipihak dalam penanggulangan TBC di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, Stop TBC Partnership Indonesia (STPI), dan Global TBC Caucus (GTBC) menyelenggarakan diskusi daring multipihak bertajuk "Pertemuan Virtual TB Nasional 2020" bagi pemeritnah eksekutif dan legislatif, sektor swasta, dan komunitas untuk menyelaraskan gagasan dan praktek baik dalam upaya eliminasi TB di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 26 November 2020. Gagasan dan praktek baik yang diperoleh melalui acara ini akan dibagikan dan didiskusikan lebih lanjut dalam "Asia Pacific TB Summit" pada 3 Desember 2020 untuk mengidentifikasi area potensial untuk kolaborasi dan koordinasi regional dalam upaya eliminasi TBC.

Kegiatan ini telah mendiskusikan situasi terkini antara lain; (1) Dampak COVID-19 terhadap TBC di Indonesia (2) Akuntabilitas nasional seputar target KTT PBB dan SDG dan; (3) Transisi GF di Indonesia.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam

pertemuan ini antara lain: (1) Komisi IX DPR RI; (2) Kementerian Kesehatan; (3) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS; (4) Country Coordinating Mechanism Indonesia (CCM Indonesia); (5) USAID Indonesia; (6) USAID Tuberculosis Private Sector (TBPS); (7) World Health Organization (WHO Indonesia); (8) Global TB Caucus; (9) Koalisi Organisasi Profesi dalam Penanggulangan TBC (KOPI TB); (10) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU); (11) POP TB; (12) PR TB 'Aisyiyah; (13) STPI ; (14) Johnson & Johnson; (15) Medco Energy; (16) Medco Foundation; (17) Otsuka Indonesia; (18) Sanofi Indonesia; (19) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI); (20) Komite Ahli Penanggulangan Tuberkulosis (KOMLI TB) dan; (21)Technical Working Group (TWG) TB.

PERTEMUAN VIRTUAL TBC REGIONAL ASIA PASIFIK 2020

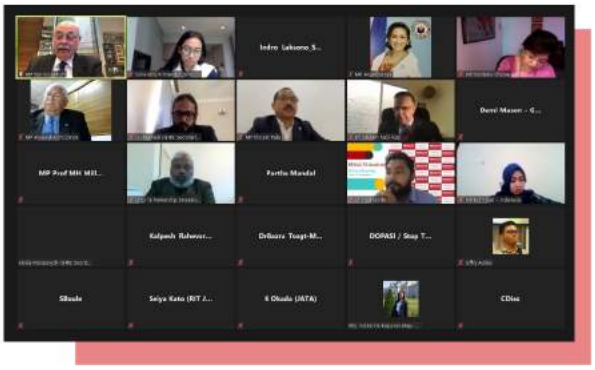

Sejak KTT TB Asia Pasifik ke-2 yang diselenggarakan di Manila pada Mei 2017, keanggotaan dan cakupan Kaukus TBC Asia Pasifik telah berkembang secara signifikan. Saat ini di Asia Pasifik, kaukus TBC nasional telah dibentuk di Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Mongolia, Nepal, Selandia Baru, Filipina, Pakistan, dan Vietnam. Selain itu, sedang dalam proses untuk meluncurkan kaukus baru di 4 negara, termasuk Indonesia dan Bangladesh. Kemajuan positif ini perlu dibagikan di antara negara-negara Asia Pasifik untuk mendukung respons nasional terhadap TBC dan COVID-19 serta mendorong kolaborasi regional. "Asia Pacific Virtual TB Summit 2020" yang diselenggarakan pada 3 Desember 2020 menyediakan platform bagi anggota parlemen untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam menangani TBC dan COVID-19 di tingkat nasional.

Tujuan dari pertemuan Asia Pasifik ini antara lain: mempertukarkan pengalaman negara-negara Asia Pasifik dalam menangani TBC dan COVID, dan mendiskusikan area-area potensial bagi kolaborasi dan koordinasi regional.

Dalam pertemuan ini, Stop TB Partnership Indonesia bekerja bersama Global TB Caucus dan Komisi IX DPR RI mereformulasikan informasi-informasi terkait gagasan dan praktek baik penanggulangan TBC di Indonesia semasa pandemi COVID-19 yang terkumpul dalam "Pertemuan Virtual TBC Nasional 2020" untuk dipertukarkan di tingkat Asia Pasifik guna mendorong kolaborasi penganggulangan TBC di tingkat regional.

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Komitmen Pemerintah dalam mencapai eliminasi TBC 2030 terwujud dengan masuknya indikator TBC dalam RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, serta Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Keluarga Sehat. Menghadapi tantangan besar untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030, Indonesia perlu merespon permasalahan TBC dengan pendekatan multi sektoral.

Kementerian Kesehatan telah mengupayakan pendekatan multisektoral dalam penanggulangan TBC sejak pertemuan High Level Meeting untuk Menteri tahun 2017 di Moscow dan telah menyatakan dukungan terhadap Deklarasi Politis pada Sidang Umum PBB tentang TBC pada tahun 2018. Namun, pendekatan multisektoral di Indonesia saat ini belum berjalan efektif karena diperlukan dasar hukum yang lebih kuat untuk memastikan peran aktif kementerian/lembaga lintas sektor, di tingkat pusat dan daerah, dalam mencapai eliminasi TBC 2030 dan bebas TBC tahun 2050.

Menindaklanjuti pencanangan Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030, persetujuan RPerpres TBC, dan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas Percepatan Eliminasi TBC, Ditjen P2P telah melaksanakan beberapa rapat dengan wakil-wakil dari instansi terkait yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Dalam Negeri serta satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Penerbitan Perpres tentang Penanggulangan TBC diharapkan akan mengakselerasi upaya multisektor dalam melaksanakan upaya-upaya untuk mencapai target eliminasi TBC. Selanjutnya dalam proses persiapan RPerpres TBC, Kementerian Kesehatan melakukan rapat secara serial untuk membahas dan menyusun RPerpres dengan Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan terkait.

Rapat pembahasan dan penyusunan RPerpres dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 14 September 2020, 4-5 November 2020, dan 12 November 2020, dengan mengundang berbagai Kementerian/Lembaga untuk memastikan penanggulangan TB di masa depan dilakukan secara lintas sektor. Dalam serial rapat pembahasan dan penyusunan RPerpres ini, STPI berperan dalam memfasilitasi pembiayaan kebutuhan logistik dan narasumber rapat.

DISTRIBUSI HANDPHONE UNTUK PASIEN TBC RO DAN PENDAMPING PASIEN

Terjadinya peningkatan jumlah orang yang terjangkit Covid-19, berdampak pada optimalisasi semua sumber daya kesehatan untuk mampu mengatasi dan mencegah penularannya. Ternyata, secara tidak langsung situasi tersebut juga berdampak pada upaya penanggulangan penyakit lain seperti TBC. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh pasien TBC, kesibukan fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan dalam melayani pasien Covid-19 ternyata telah berdampak pada layanan TBC termasuk pengobatan dan diagnosis. Pasien dan keluarga juga mengalami keterbatasan untuk mengakses layanan kesehatan akibat adanya pembatasan transportasi. Demikian juga dengan mekanisme dukungan sosial yang diberikan kepada pasienpun menjadi sangat terbatas karena semua pihak diharuskan untuk berjarak dan menghindarkan kontak secara langsung dan dekat.

Strategi pengembangan mekanisme pendampingan virtual menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pemantauan pengobatan orang terdampak TBC RO. Pendampingan virtual ini dilakukan untuk memastikan pasien tetap melanjutkan pengobatan termasuk upaya edukasi pasien dan memberikan motivasi. Tetapi, upaya tersebut belum optimal, salah satunya karena keterbatasan atau tidak semua pasien TBC RO memiliki *smartphone* yang siap untuk dapat berkomunikasi dengan pendamping pasien.

STPI bekerjasama dengan POP TB dan LKNU, memberikan dukungan *smartphone* Stop TB Partnership Indonesia menyalurkan bantuan hibah 220 unit *handphone* untuk pasien TBC RO dan pendamping pasien guna menguatkan pemantauan kepatuhan pengobatan pasien TBC RO melalui organisasi pasien TBC dengan rincian (1) POP TB Indonesia 20 unit (2) Pejuang Tangguh (PETA) dengan jumlah 100 unit (3) Yayasan Terus Berjuang (TERJANG) Jawa Barat 50 unit (4) Yayasan Rekat Surabaya 25 unit dan (5) Panter Malang sejumlah 25 unit. Selain itu, STPI juga memberikan dukungan paket data untuk pasien TBC RO yang mendapatkan bantuan *handphone* selama 4 bulan sehingga penggunaan handphone bisa lebih optimal.

MANAJEMEN ORGANISASI DAN PROGRAM

MANAJEMEN ORGANISASI DAN PROGRAM

PENYUSUNAN MEKANISME KERJA INTENAL ORGANISASI

Secara internal, STPI dalam kurun waktu 2020 telah mampu mengembangkan mekanisme kerja organisasi yang meliputi SOP Program, SOP Administrasi dan SOP keuangan. Berikut SOP-SOP yang telah disusun dan dipraktekkan sebagai panduan kerja organisasi:

1. SOP Keuangan
   - Prosedur Penganggaran
   - Prosedur Penerimaan
   - Prosedur Pengeluaran

2. SOP Administrasi
   - Administrasi Umum-Operasional Kantor
   - Administrasi Program-Perjalanan Dinas
   - Administrasi Program-Penyelenggaraan Acara/Kegiatan
   - Administrasi Program - Pengadaan Barang dan Jasa
   - Manajemen Property - Fixed asset
   - Administrasi Program-Kerjasama Mitra Lokal
   - Administrasi Program-Kerjasama dengan Donor

3. SOP Alur Komunikasi
   - Komunikasi Internal
   - Komunikasi Eksternal

4. SOP Program Management
   - Penyusunan rencana strategis program
   - Penyusunan kerangka logis program
   - Penyusunan rencana kerja tahunan
   - Penyusunan proposal program donor
   - Penyusunan proposal program mandiri
   - Pelaksaan Kegiatan yang dikelola langsung
   - Pelaksanaan Kegiatan yang dikelola pihak lain
   - Pelaporan kegiatan yang dikelola langsung
   - Pelaporan kegiatan yang dikelola pihak lain
   - Pembentukan Tim Tanggap bencana
   - Asesmen awal tanggap darurat
   - Perencanaan tanggap darurat
   - Pelaksanaan tanggap darurat

5. SOP Monitoring Evaluasi
   - Pelaporan Kegiatan Mingguan
   - Pelaporan Program Bulanan
   - Pelaporan Program Kuartal
   - Pelaporan Program Semester
   - Pelaporan Program Tahunan
   - Monev Kuartal
   - Monev Tahunan

6. Peraturan Kepegawaan Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis Indonesia

PENGUATAN SUMBERDAYA ORGANISASI STPI

Dalam rangka penguatan organisasi, selama 2020 dilakukan penambahan staf dan manajer dalam struktur organisasi STPI. Rekrutmen staf dan manajer yang baru dilakukan untuk beberapa posisi antara lain: *Finance Admin Officer, Field Officer* (Lombok Barat dan Sumenep), *Program Development and Knowledge Manager, Advocacy Officer,* dan *Program Support Officer.*

BANTUAN PENDANAAN DARI EKSTERNAL FUNDING

Selama 2020, STPI juga telah mampu mengembangkan program melalui beragam pendanaan dari eksternal. Pendanaan eksternal ini memiliki peran yang signifikan untuk memperkuat kerja-kerja dan jaringan STPI dalam mendorong percepatan eliminasi TBC 2030. Beberapa pendanaan program yang diperoleh pada 2020 ini sebagai berikut:

1. The Global Fund

Pendanaan Global Fund ATM 2021-2023

Indonesia telah mengirimkan proposal program TBC untuk menerima dana hibah Global Fund to Fight against AIDS, TBC and Malaria (GFATM) komponen TBC periode 2021 – 2023.

Sejak tahun 2008/2009, GFATM menganjurkan setiap Negara yang bermitra dengan GFATM, untuk menggunakan *"Dual track mechanism"* dimana Principal Recipient dari Negara, menggunakan mekanisme grant implementation melalui pemerintah dan organisasi non pemerintah, sebagai penerima hibah (*Principal Recipient*) Indonesia pada *Grant cycle* ini, membuka kesempatan untuk organisasi komunitas mengajukan proposal untuk bermitra sebagai Principal Recipient bagi kegiatan TBC di komunitas, setelah Aisyiyah yang menjadi PR selama 12 tahun terakhir menyatakan tidak lagi melanjutkan *PR-ship* nya.

STPI bersama Yayasan Penabulu membentuk Konsorsium untuk mengajukan diri sebagai penerima

dana hibah GF komponen TBC dari kelompok komunitas. Setelah melalui proses seleksi dan penilaian oleh Global Fund, Konsorsium Penabulu-STPI) dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai Principal Recipient (PR) berdasarkan surat CCM (Country Coordinating Mechanism) Indonesia No: 285/CCM/SEC/IX/2020.

Sebagai PR TB komunitas baru, Konsorsium Penabulu-STPI akan bertanggungjawab untuk melaksanakan program GF TB tahun 2021 - 2023 di 30 Provinsi dan 190 Kabupaten/Kota. Sebagai Principal Recipient, Konsorsium menerapkan system clustering Kabupaten/Kota dan akan membawahi 24 Sub Recipient (SR) ditingkat Provinsi dan 144 Sub-Sub Recipient (SSR) di tingkat Kabupaten/Kota (22 diantaranya adalah wilayah baru).

Secara keseluruhan pendanaan PR-TB komunitas untuk periode 2021-2023 dari Global fund berjumlah USD 26,461,010 sesuai rancangan dalam *Funding Request Proposal* Indonesia yang berlandaskan Strategi Nasional TBC 2020-2024. Kegiatan Konsorsium Penabulu-STPI akan mencakup intervensi pelayanan TBC dan TBC resisten obat berbasis komunitas (investigasi kontak; pendampingan minum obat; pelacakan pasien TBC RO mangkir), penguatan sistem komunitas, serta upaya mengatasi hambatan hukum, HAM dan gender dalam mengakses layanan TBC yang berkualitas.

2. Stop TB Partnership

Pendanaan Program ACE TB CFCS 2020

Dalam beragam kasus, orang yang terdampak TBC telah mendapatkan stigma, diskriminasi, marjinalisasi dan ketidakadilan yang menghambat hak asasi manusia. Pendekatan kerangka hak asasi manusia terhadap penanganan TBC diperlukan untuk mengurangi dampak lanjutan orang terdampak TBC dalam sisi sosial, ekonomi dan budaya. Kerangka kerja hak asasi manusia ini didasarkan pada prinsip bahwa layanan pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan TBC yang berkualitas dan tepat waktu harus tersedia, dapat diakses, dan dapat diterima oleh semua.

Sebagai bagian dari aktor kunci pengendalian TBC, komunitas harus mendapatkan pengembangan kapasitas untuk dapat menjalankan

peran edukasi, pemantauan dan advokasi secara maksimal. Mekanisme pembiayaan Challenge Facility for Civil Society mendanai proposal untuk mengatasi hambatan dalam layanan pemeriksaan dan pengobatan; mempromosikan hingga menjangkau masyarakat, pendidikan dan advokasi; memberi bantuan hukum terhadap diskriminasi sistemik; dan memfasilitasi pemantauan respon menangani TBC, meminta pertanggungjawaban pemerintah atas komitmen yang dibuat dalam deklarasi PBB tentang TBC.

Dalam kerangka hibah ini, pada 2020- 2021 STPI berkolaborasi dengan POP TB Indonesia mendapatkan dukungan dana dari Stop TB Partnership Global melalui mekanisme pembiayaan Challenge Facility for Civil Society. Adapun besaran pendanaan berjumlah 100.000 USD.

Hibah program akan berisikan serangkaian kegiatan pemberdayaan komunitas TB terkait advokasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Program ini diharapkan meningkatkan kapasitas komunitas TBC termasuk pemangku kepentingan TBC, membantu mengidentifikasi dan memantau hambatan terutama untuk mengakses layanan, memperkuat advokasi komunitas ditingkat nasional dan daerah, serta dapat meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi komunitas, masyarakat serta pihak lain dalam merespon program TBC di Indonesia.

3.

Pendanaan Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030

Kompleksitas permasalahan TBC di Indonesia, tidak bisa ditangani oleh hanya satu sektor tertentu saja. Gerakan bersama lintas sektor dalam penanggulangan TBC di Indonesia harus mulai disemai untuk mendapatkan hasil panen dari penanggulangan TBC yang lebih maksimal.

STPI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, 29 Januari 2020 meluncurkan 'Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030'. Kegiatan diselenggarakan di Techno Park Cimahi, Jawa Barat. Pertemuan ini dihadiri lebih dari 800 perwakilan kementerian/lembaga, pimpinan daerah, sektor swasta, serta anggota masyarakat. Momentum ini bertujuan untuk mendorong respon terhadap TBC di nasional dan daerah yang berlandaskan pendekatan lintas sektor.

Dalam pelaksanaannya pendanaan kegiatan ini didukung oleh Medco Internasional dengan jumlah IDR. 2.000.000.000 dan Bank Mandiri dengan besaran IDR 200.000.000.

PENGEMBANGAN PANDUAN PROGRAM

Pada tahun 2020, STPI juga telah mengembangkan panduan sederhana untuk memperkuat kerja-kerja program dan kegiatan di daerah STPI. Beberapa panduan yang telah disusun sebagai berikut:

PANDUAN PENYUSUNAN PROFIL TBC DAERAH

Pada 2020, STPI telah membuat panduan ringkas tentang penyusunan profil TBC daerah. Profil TBC daerah ini memuat gambaran TBC daerah dari sisi situasi TBC, program TBC daerah, kebijakan dan anggaran TBC daerah serta kondisi sosial budaya masyarakat yang berkorelasi dengan pengendalian TBC.

Dalam panduan profil TBC dijelaskan juga tentang mekanisme dan tahapan penyusunan profil TBC yang dimulai dari tahap persiapan, sosialisasi, pengumpulan data sekunder dan primer, analisa data, penulisan draf, *workshop* draf, revisi draf, *workshop* hasil revisi, finalisasi dan diseminasi profil TBC.

PANDUAN FORUM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TBC DAERAH

Forum pencegahan dan pengendalian TBC yang terdiri dari para pemangku kepentingan lintas sektor dapat berkontribusi untuk memobilisasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan pencegahan dan pengendalian TBC menjadi bagian prioritas ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan. Pada 2020, STPI menyusun panduan pembentukan forum TBC daerah. Panduan ini memuat prinsip dan fungsi forum TBC, tahapan pembentukan forum dan pengelolaan forum TBC. Selain itu, dalam panduan dilampirkan juga statuta forum yang bisa diadaptasi sesuai dengan kebutuhan daerah.

PANDUAN PEMBENTUKAN SATGAS TBC

Salah satu strategi program TBC nasional, adalah Peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi TBC. Strategi ini mengamanatkan pembentukan Satgas TBC di daerah. Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan panduan pembentukan Satgas TBC untuk standarisasi proses pembentukan Satgas TBC.

STPI berikhtiar membuat panduan satgas TBC di tingkat desa-kabupaten. Dalam panduan dijelaskan tentang pengertian satgas, tugas dan fungsi satgas, kelembagaan satgas yang memuat struktur dan tugas unit, tahapan pembentukan dan mekanisme koordinasi dengan *multistakeholder* TBC.

PANDUAN RINGKAS SWAKELOLA TIPE III

Swakelola tipe III akan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi. Kelebihan organisasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang dekat dengan masyarakat memberikan nilai tambah bagi program dan kegiatan yang didanai dari pemerintah.

Berkaitan dengan itu, komunitas penggiat TBC harus memiliki pemahaman yang kuat tentang swakelola tipe III sehingga mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah untuk kerja-kerja pencegahan dan pengendalian TBC. Penerbitan panduan ini ditujukan bagi pimpinan organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang pencegahan dan pengendalian TBC. Tujuannya adalah untuk memudahkan jejaring TBC dalam memahami maksud dan tujuan serta proses pelaksanaan Swakelola Tipe III. Panduan ringkas ini berisi dasar hukum, swakelola, tujuan, dan tata cara pelaksanaan Swakelola Tipe III dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Selain itu dijelaskan juga tentang syarat Ormas untuk bisa terlibat.

2021

STPI